LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN
TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2022 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan .

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2022. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan .

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2022 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber daya Aparatur dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan

Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2022. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, 09 Januari 2023
Kepala Dinas,

Dr. Witoyo
NIP. 19650111 200012 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 – 2024 yang mengacu pada visi dan misi Kota Tarakan dan Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada misi 2 dengan 1 tujuan dan 1 indikator tujuan .

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2022 berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 97,67 **%.** Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA (Perangkat Daerah) Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6.500.884.800,- dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6.111.168.153,- atau 94.01 **% .**

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran yang mencakup 6 indikator sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **capaian kinerja tahun 2022 mencapai 97,67 %,** dengan uraian : 6 sasaran sangat tinggi .

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Tahun 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I
PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi 2

C. Aparat Pemerintah 10

D. Isu Strategis 13

BAB II
PERENCANAAN KINERJA 22

A. Visi Kota Tarakan 2019-2024 23

B. Misi Kota Tarakan 2019-2024 23

C. Tujuan dan Sasaran 24

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 26

E. Indikator Kinerja Utama 29

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 31

A. Pengukuran Kinerja 32

B. Analisis Pengukuran Kinerja 34

C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran 66

BAB IV

PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Tindak lanjut rekomendasi 76

LAMPIRAN

1. Ringkasan DPA Tahun 2022
2. Rincian DPA Pendapatan Tahun 2022
3. Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022
5. Buku Kas Umum (BKU) Pendapatan)
6. Metadata Variabel Statistik Sektoral
7. Laporan Konsolidasi Tahun 2022
8. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2022
9. Surat Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat
10. Lembar Kesesuaian Laporan Kinerja (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan selaku unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis 2019-2024; (2) Rencana Kerja Tahun 2022, dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Sub Koordinator (Eselon IVa), 1 (satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu) Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN

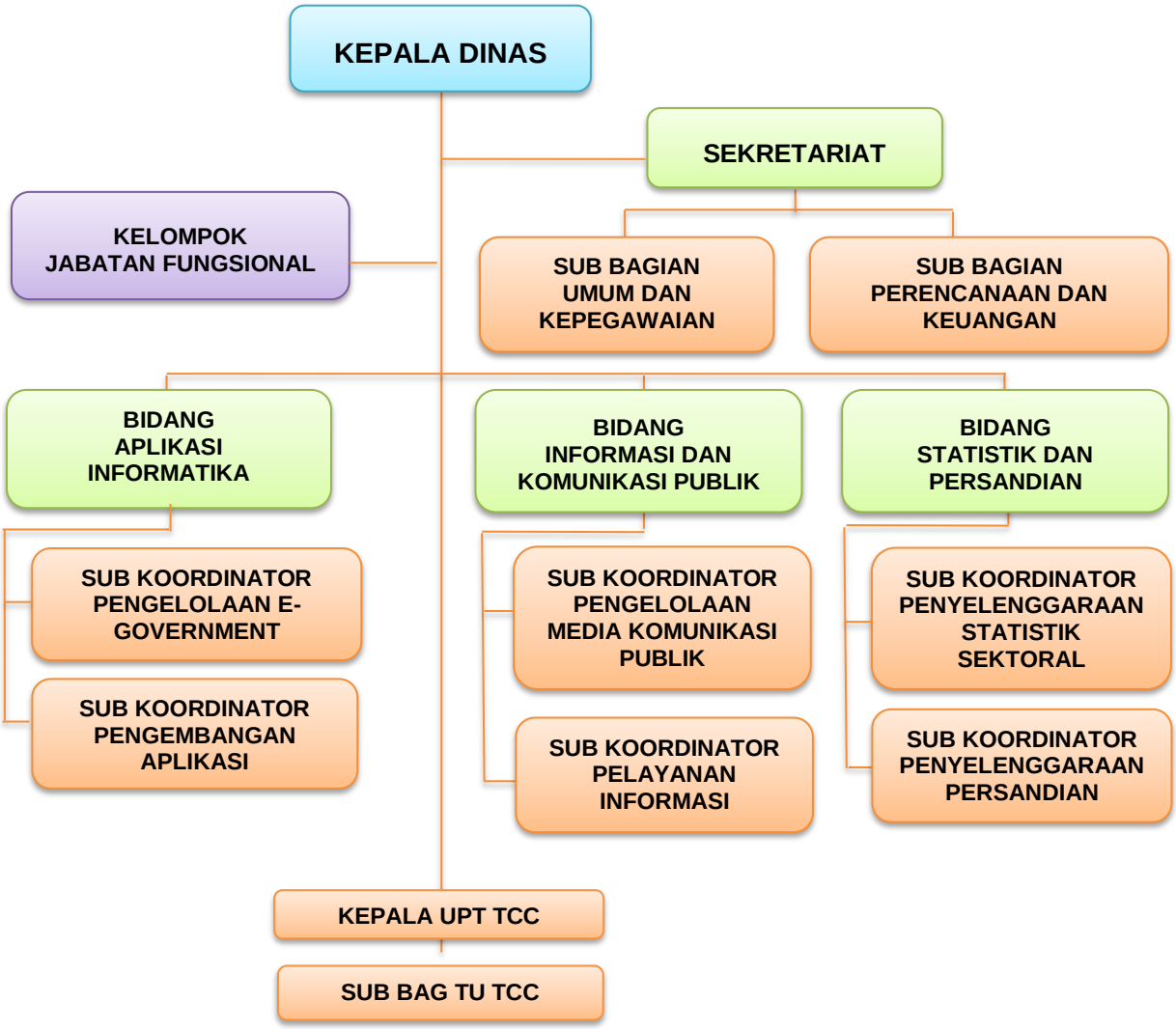

Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik dan Persandian
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sekretariat

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

   Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas .

   Sekretariat dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan Dinas;
2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. koordinasi dan penyusunan produk hokum daerah pada Dinas;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. monitoring opini dan aspirasi publik;
3. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;

4. pengelolaan media komunikasi publik;
5. pelayanan informasi publik;
6. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
7. koordinasi dan sinkronisasi data dan infonnasi elektronik;
8. layanan hubungan media;
9. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
10. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
11. manajemen komunikasi krisis;
12. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
13. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
14. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Aplikasi Informatika

1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem *smart city*;
4. Pengelolaan *E-Government* dilingkup Pemerintah Daerah;
5. Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
6. Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)
7. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung inforrnasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepada Bidang Aplikasi Informatika

d. Bidang Statistik dan Persandian

1. Bidang Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik dan persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian

untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data inforrnasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. UPT *Tarakan Command Center (TCC)*

Dasar pembentukan UPT *Tarakan Command Center* berdasarkan Perwali Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas *Tarakan Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

1. UPT *Tarakan Command Center* merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .

2. UPT *Tarakan Command Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .

UPT *Tarakan Command Center* mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas UPT *Tarakan Command Center* juga menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan UPT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Pelaksanaan layanan *call center 112*
4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan *call center 112*
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya menangani urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II.1. Jumlah Pegawai

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
a. Sekretariat	8	6	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	1	6
c. Bidang Aplikasi Informatika	9	-	9
d. Bidang Statistik dan Persandian	4	-	4
e. UPT TCC	3	22	25
Jumlah	**29**	**29**	**58**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Gambar II.1. Grafik Jumlah Pegawai

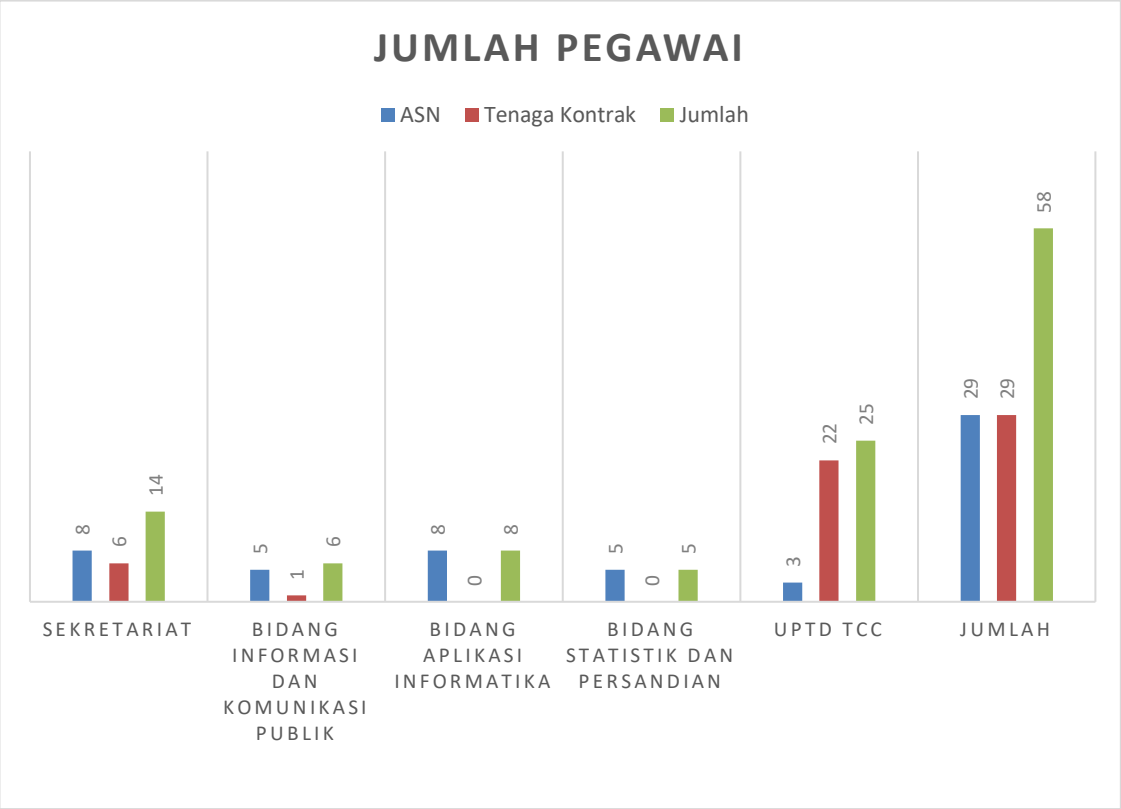

Tabel II.2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai
(ASN dan Tenaga Kontrak)

Sekretariat / Bidang	S 2		S1/D4		D 3		SLTA		SLTP/SD		Jumlah
	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	
a. Sekretariat	2	-	5	2	-	-	1	2	-	2	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	6
c. Bidang Aplikasi Informatika	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
e. UPT TCC	-	-	3	3	-	-	-	17	-	2	25
Jumlah	5	-	20	6	3	-	1	19	-	4	58

Gambar II.2. Grafik kualifikasi Pendidikan ASN

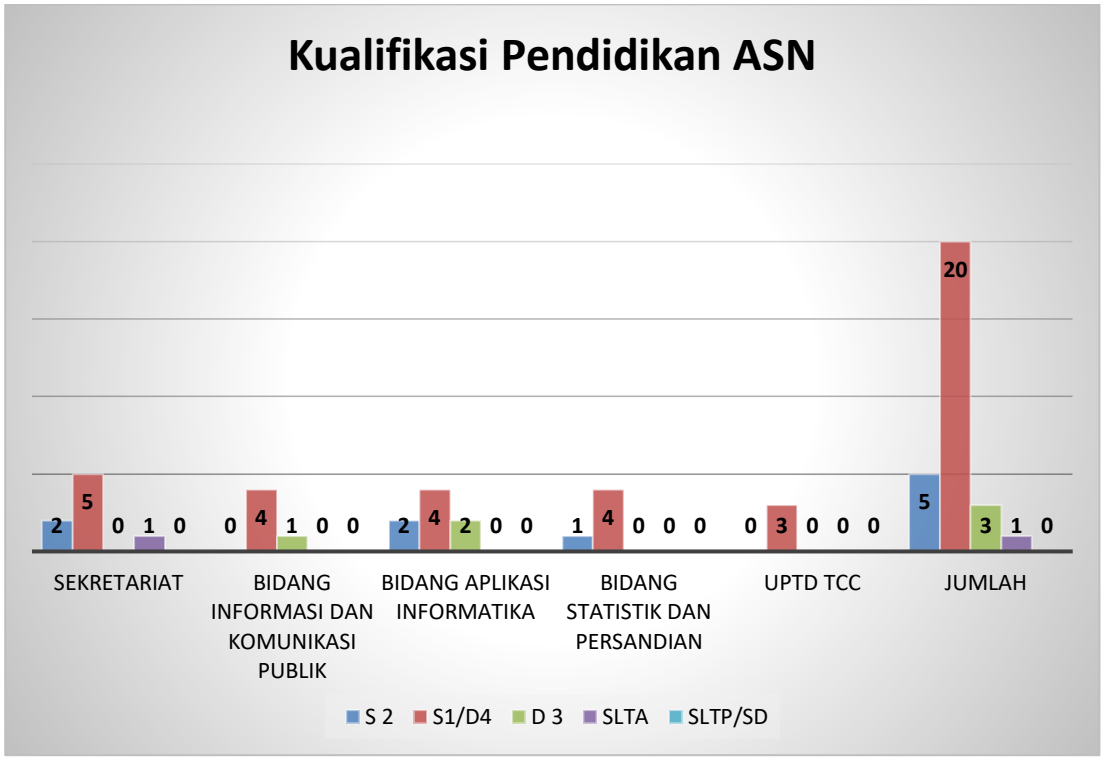

Gambar II.3. Grafik kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak

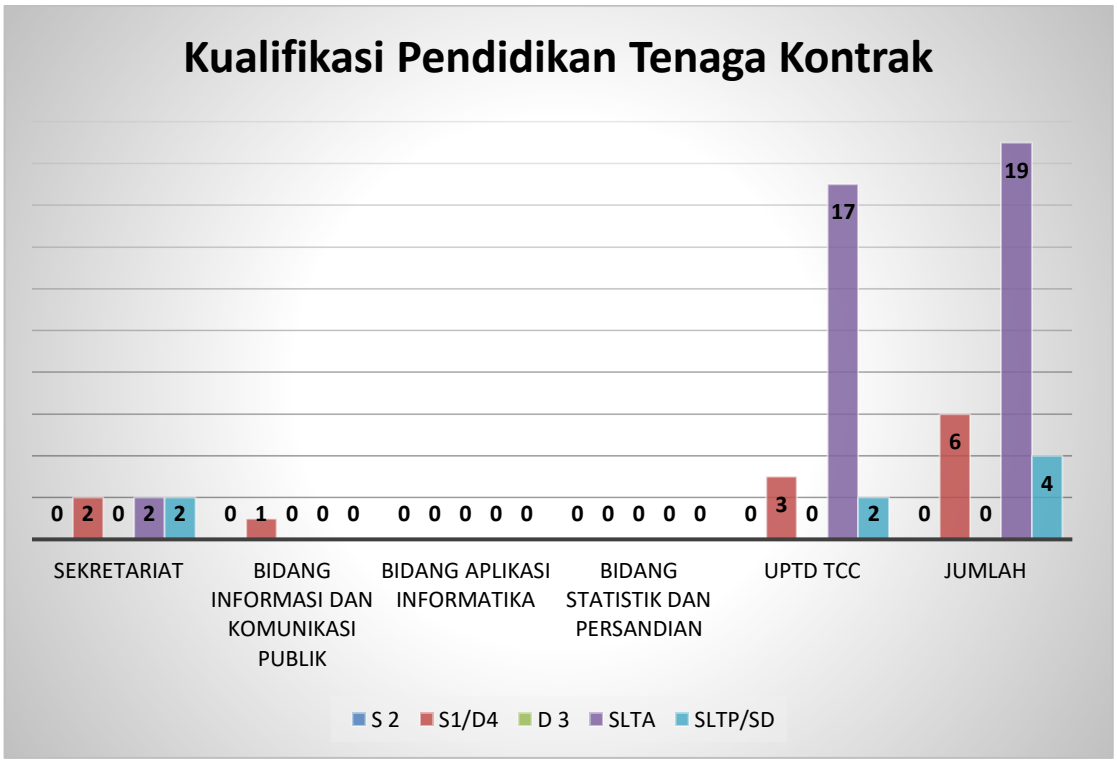

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

D. ISU STRATEGIS

Demi mewujudkan Visi Kota Tarakan tahun 2019 – 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mengangkat beberapa isu strategis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi Publik;
2. Komitmen terhadap *E-Goverment* serta;
3. Penggalian Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam melaksanakan tupoksinya :

1. Pengembangan sumberdaya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan jurnalistik, belum memadai dari segi skill dalam pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sehingga mengakibatkan terhambatnya penyebarluasan informasi Pembangunan Pemda yang cepat, mudah, dan akurat ;
2. Situs (website) *tarakankota.go.id* yang melayani masyarakat dalam urusan umum belum optimal dalam pelaksanaannya baik kuantitas maupun kualitasnya ;
3. Implementasi *E-Goverment* yang ada belum ideal dan belum terintegrasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan sebagai akibat standarisasi yang belum baku dan sosialisasi yang masih kurang ;
4. Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi belum optimal karena belum memiliki aplikasi *Cell plan* hasil kajian Pemkot Tarakan ;
5. Layanan jasa (Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal khususnya Bandwidth untuk seluruh OPD ;
6. Pembangunan dan Pengembangan Data Center atau Bank Data yang terintregrasi (terpadu) untuk Pemerintah Kota Tarakan belum dapat dilakukan dikarenakan Jaringan infrastruktur TIK seperti koneksi menggunakan *FO (Fiber Optik)* atau *WLAN (Wireless Local Area Network)* antara OPD belum dibangun menyeluruh ;
7. Pembangunan Jaringan infrstruktur TIK belum dapat menjangkau semua OPD yang ada di lingkungan Pemkot. Tarakan dikarenakan keterbatasan anggaran ;

8. Sinergisitas Pemda dan media perlu dibangun maksimal untuk mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab ;
9. Ruang Video conference yang ada belum memadai karena keterbatasan ruangan yang tersedia ;
10. Peluang penerimaan restribusi jasa umum usaha di sektor Komunikasi dan Informasi belum digali secara maksimal .

Dari permasalahan diatas diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan, yaitu :

1. **Tataran kebijakan** pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

   Implementasi *E-Goverment* belum sepenuhnya diterapkan pada pengelolaan dan layanan pemerintahan Kota Tarakan

2. **Implementasi program dan kegiatan** pada bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan, sebagai berikut :

   a. Aplikasi yang tersedia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi
   b. Layanan infrastruktur jaringan belum mencakup seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Tarakan
   c. Pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat layanan publik maupun layanan informasi belum seluruhnya berbasis *E-Government*, sehingga layanan publik yang cepat, mudah, tepat dan transparan belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

3. **Teknis operasional** yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, sebagai berikut :

   a. Kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknis masih belum tercukupi sehingga perlu pengembangan sumberdaya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan jurnalistik, belum memadai dari segi skill dalam pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

   b. Layanan jasa (Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal khususnya *Bandwidth* untuk seluruh OPD

   c. Sinergisitas Pemerintah Kota dan media perlu dibangun maksimal untuk mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab

   d. Belum optimalnya layanan informasi dan pengaduan masyarakat berbasis IT

   e. Belum tersedianya Pusat Data (data center) yang menyediakan data sektoral Kota Tarakan

   f. Peningkatan pengawasan dan monitoring menara telekomunikasi serta peningkatan PAD melalui retribusi menara telekomunikasi perlu lebih ditingkatkan

   g. Belum terlaksananya sistem keamanan informasi oleh Pemerintah Kota

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal, faktor internal yang mempengaruhi (Perangkat Daerah) Kota Tarakan antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja adalah :

1. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat yang berubah sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Teknologi yang berkembang sangat cepat sehingga perlu adaptasi yang cepat pula dari SDM, kebijakan dan tata kelola pemerintahan
3. Dukungan anggaran yang belum memadai untuk kegiatan yang mendukung program unggulan Pemerintah Kota Tarakan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance.* Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance.*

2. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan

(*Institutional reegineering*) yang ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3. Peningkatan Layanan Publik berbasis Informasi Teknologi

Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri berpengaruh signifikan terhadap pola pelayanan kepada masyarakat. Layanan publik saat ini harus berorientasi pada layanan publik yang cepat, mudah, tepat, dan transparan . Dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga harus memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, atau yang lebih kita kenal dengan istilah *E-Government* tersebut, sebaiknya bukan

hanya sekadar mengikuti tren global, melainkan juga merupakan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.

E-Government dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus datang langsung ke institusi pemerintahan terkait. Keterbukaan informasi juga akan mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Selain itu, *E-Government* juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, salah satu contoh penerapan *E-Government* melalui sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) terbukti menghasilkan efisiensi. Dengan penerapan satu jenis layanan berbasis *E-Government* saja pemerintah sudah dapat merasakan manfaatnya, khususnya dari segi efisiensi.

Ada beberapa poin penting yang perlu ditingkatkan dalam penerapan *E-Government* di Kota Tarakan :

Pertama, pemasifan *E-Government* Demi pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, semua OPD harus menerapkan *E-Government*. Untuk itu, infrastruktur, meliputi infrastruktur fisik, jaringan, maupun SDM juga harus dipersiapkan.

Kedua, standardisasi *E-Government* perlu adanya suatu standardisasi yang jelas dalam pelaksanaannya agar kebijakan pengembangan *E-Government* dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu di semua OPD.

Ketiga, integrasi *E-Government*, pengembangan sistem *E-Government* diperlukan kerangka komunikasi antarsistem *E-Government* di semua OPD untuk

saling berhubungan dan bekerja sama. Dalam implementasinya, perlu ada mekanisme komunikasi baku antarsistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk *E-Government services* yang lebih besar dan kompleks.

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota harus melakukan kampanye pemasaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka sadar tentang keberadaan dan manfaat *E-Government*.

Kelima, hal terakhir yang harus dilaksanakan adalah Pemerintah perlu terus mengevaluasi tingkat penerimaan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan *E-Government,* serta frekuensi dan intensitas penggunaan *E-Government.* Evaluasi ini penting agar pemerintah dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya sehingga dapat terus memberikan pelayanan publik yang prima.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Kota Tarakan. Rencana Strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis (Perangkat Daerah) Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra (Perangkat Daerah) Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, antar SKPD dan *stakeholder.*

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Pemerintah Kota Tarakan 2019-2024

“ Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City* “

B. Misi Pemerintah Kota Tarakan 2019-2024

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Tujuan dan Sasaran DKISP

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun tujuan dan sasaran DKISP adalah:

Tujuan :

"Terwujudnya pengelolaan *E-Government* yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah"

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu :

- Sasaran 1 : Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan
- Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang merata
- Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir
Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada system penganggaran yang pro-rakyat													
1	Terwujudnya pengelolaan e-government yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan *e-government* yang terintegrasi	1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	1	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	%	3 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					2	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	3	Persentase media layanan informasi publik	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					4	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	%	52 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					5	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	6	Nilai dan predikat SAKIP	Poin/ Grade	65/B	65/B	65/B	70/B	70/B	70/B

Tabel 2.2
Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tarakan 2019-2024

Fungsi Dinas	Misi dan Tujuan Kota Tarakan	Sasaran Kota Tarakan	Strategi Kota Tarakan	Arah Kebijakan Kota Tarakan
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	**Misi 2 :** Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat	**Sasaran 4 :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan **Sasaran 6 :** Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	**Strategi 4 :** Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Arah Kebijakan 15 :** Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan kelitbangan daerah **Arah Kebijakan 16 :** Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah **Arah Kebijakan 18 :** Peningkatan kualitas layanan publik berbasis tekhnologi informasi
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan			

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2022, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Kalimantan No.1 Telp. (0551) 34200
Email: diskominfo@tarakankota.go.id Web site : www.tarakankota.go.id
T A R A K A N (Kode Pos 77131)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. Witoyo**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **dr. Khairul, M.Kes**
Jabatan : Wali Kota Tarakan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 03 Oktober 2022

Pihak Kedua,
Wali Kota Tarakan

dr. Khairul, M.Kes

Pihak Pertama,
Kepala Dinas

dr. Witoyo
NIP. 19650111 200012 1 002

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Kalimantan No.1 Telp. (0551) 34200
Email: diskominfo@tarakankota.go.id Web site : www.tarakankota.go.id
T A R A K A N (Kode Pos 77131)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAKAN

No.	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	1.	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	100 % (30 OPD)
		2.	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	100 % (130 Menara)
2.	Meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	1.	Persentase media layanan informasi publik	100 % (5 jenis)
		2.	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	100 % (30 OPD)
		3.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	100 % (4 aplikasi)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP	1.	Nilai/predikat SAKIP	70/B

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.600.592.160,-	APBD
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	946.000.000,-	APBD
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp	889.029.500,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	39.999.500,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	25,263,640,-	APBD

Total Anggaran Tahun 2022 : Rp 6.500.884.800,-

Tarakan, 03 Oktober 2022

Pihak Kedua,
Wali Kota Tarakan

dr. Khairul, M.Kes

Pihak Pertama,
Kepala Dinas

dr. Witoyo
NIP. 19650111 200012 1 002

E. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis (Perangkat Daerah), perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	1	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	$\frac{\sum \text{PD yang terkoneksi dengan bandwith server}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\ \%$	%	100 %	Laporan Konsolidasi Pembangunan	Bidang Aplikasi Informatika
	2	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	$\frac{\sum \text{menara telekomunikasi yang berkontribusi}}{\sum \text{menara telekomunikasi}} \times 100\ \%$	%	100 %	Laporan Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi	Bidang Informasi dan Komunikasi
Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	1	Persentase media layanan informasi publik	$\frac{\sum \text{media layanan informasi publik yang digunakan untuk meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi serta informasi}}{\sum \text{media layanan informasi publik}} \times 100\ \%$	%	100 %	Laporan Konsolidasi Pembangunan	Bidang Informasi dan Komunikasi
	2	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\ \%$	%	100 %	Laporan Data Sektoral Kota Tarakan	Bidang Statistik dan Persandian
	3	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	$\frac{\sum \text{aplikasi layanan publik yang terealisasi yang digunakan OPD}}{\sum \text{aplikasi layanan publik yang dianggarkan}} \times 100\ \%$	%	100 %	Laporan Konsolidasi Pembangunan	Bidang Aplikasi Informatika
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	1	Nilai/predikat SAKIP	Nilai/predikat SAKIP	Poin/ Grade	70/B	LHE SAKIP	Sekretariat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah.

Pelaporan kinerja Tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh DKISP.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d < 90	Tinggi
3	66 s/d < 75	Sedang
4	51 s/d < 65	Rendah
5	0 s/d<50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DKISP Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	30 OPD 100 %	30 OPD	100,00 %
		Persentase kontribusi provider telekomunikasi	130 Tower 100 %	129 Tower	99,23 %
2	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Persentase media layanan informasi publik	5 Jenis 100 %	5 Jenis	100,00 %
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	30 OPD 100 %	28 OPD	93,33 %
		Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	4 Aplikasi 100 %	4 Aplikasi	100,00 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	Nilai/Predikat SAKIP	70/B	65,41/B	93,44 %
CAPAIAN KINERJA					**97,67 %**

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Sampai Dengan Tahun Ketiga (2022)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Taeget Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2022 thd Target RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	%	3	100	30 OPD	30 OPD	100	100	67,67 %
	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	%	102,31	100	130 Tower	129 Tower	99,23	100	100,51 %
2	Persentase media layanan informasi publik	%	100	100	5 Jenis	5 Jenis	100	100	100,00 %
	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	%	81,25	90,00	30 OPD	28 OPD	93,33	100	88,19 %
	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	%	100	100	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00	100	100,00 %
3	Nilai/Predikat SAKIP	Poin/ Grade	63,80/B	50,48/CC	70/B	65,41/B	65,41/B	70/B	65,41/B

Pencapaian kinerja 5 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2022

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	6
2	76 s/d < 90	Tinggi	-
3	66 s/d < 75	Sedang	-
4	51 s/d < 65	Rendah	-
5	0 s/d < 50	Sangat Rendah	-
Total Sasaran			6

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan : **Terwujudnya pengelolaan *E-Government* yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah**

Sasaran 1	**:**	**Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan**
Indikator 1	**:**	**Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan**
Indikator 2	**:**	**Persentase kontribusi provider telekomunikasi**

Indikator 1 : Persentase OPD yang terkoneksi bandwith server adalah perbandingan antara perangkat daerah yang terkoneksi bandwith server dengan jumlah keseluruhan perangkat daerah dikalikan seratus persen .

Untuk menghitung persentase OPD yang terkoneksi dengan bandwith Tahun 2022 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{OPD yang terkoneksi dengan bandwith server}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\ \%$$

Pada Tahun 2022 dari target 30 OPD yang terkoneksi bandwith server dapat terealisasi seluruhnya, dengan kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk layanan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD serta layanan publik *Call Center 112*.

Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 100 % atau 30 OPD, sedangkan anggaran bandwith internet untuk seluruh perangkat daerah masih berada di masing-masing Perangkat Daerah .

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 1 Indikator 1 :

Program	:	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	:	Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (**SPBE**)
2. Visi Kota Tarakan mewujudkan Kota Tarakan yang maju dan sejahtera melalui *Smart City* sehingga banyak kegiatan/layanan publik yang dilaksanakan dengan sistem elektronik dan tentunya hal ini sangat membutuhkan ketersediaan jaringan dan bandwith server yang memadai
3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga Program/Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bandwith untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2018	915.769.000	665.623.000	72,68
2.	2019	828.899.495	732.403.445	86,09
3.	2020	884.545.400	742.871.500	83,98
4.	2021	700.000.000	454.605.755	64,94
5.	2022	509.520.000	450.035.180	88,33

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2018 – 2022

Untuk tahun 2022 layanan bandwith untuk PD telah menggunakan jaringan *fiber optic* yang pengerjaan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Perumda Tarakan Media Telekomunikasi dibawah pengawasan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, namun

belum mencakupi seluruh OPD hanya PD di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah dan Barat sedangkan PD yang berada di wilayah Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Utara masih menggunakan jasa PT Telkom .

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi OPD yang Terkoneksi *Bandwith Server* untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) :

No.	Tahun	Target Jumlah OPD	Realisasi	Persentase (%)	Kategori/Keterangan
1.	2018	31 OPD	1 OPD	3,00 %	bandwith 10 Mbps terfokus pada penyediaan bandwith LPSE
2.	2019	31 OPD	1 OPD	3,00 %	karena keterbatasan anggaran dan prioritas bandwith 10 Mbps hanya untuk layanan publik Call Center 112 dan Fleet Management System
3.	2020	32 OPD	1 OPD	3,00 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk layanan publik Call Center 112, Fleet Management System dan aplikasi pengaduan e-Qlue
4.	2021	30 OPD	30 OPD	100,00 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk penyedian bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan layanan Call Center 112
5.	2022	30 OPD	30 OPD	100,00 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk penyedian bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan layanan Call Center 112

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2018 – 2022

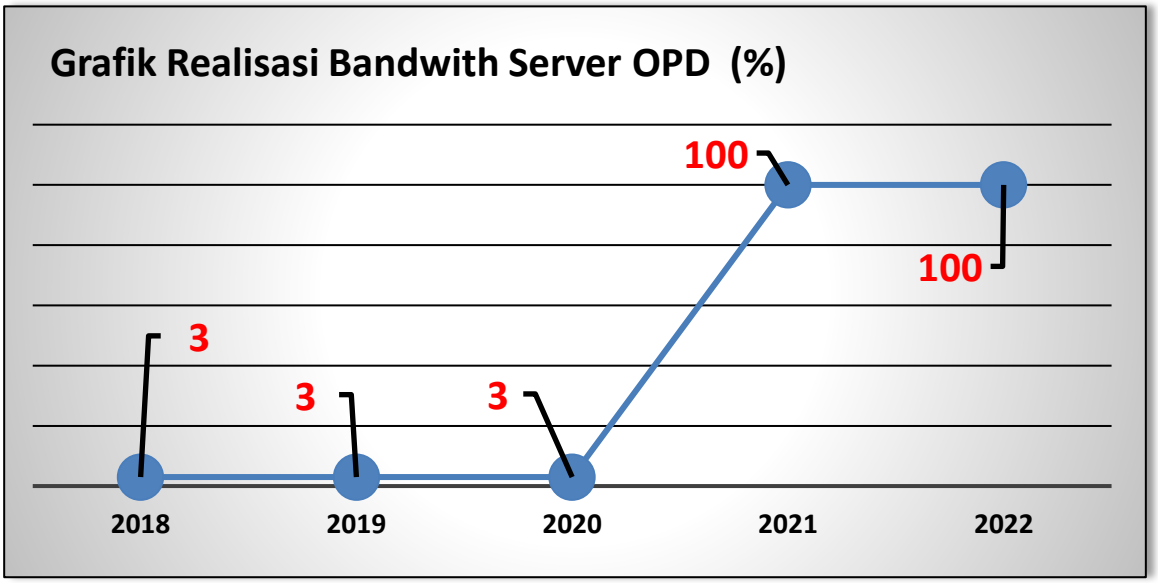

Indikator 2 : Persentase kontribusi provider telekomunikasi adalah perbandingan antara jumlah menara yang membayar retribusi Menara dibanding dengan jumlah target menara yang telah ditetapkan

Dengan didasari oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum .

Untuk menghitung persentase kontribusi provider telekomunikasi Tahun 2022 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Menara telekomunikasi yang berkontribusi}}{\sum \text{Menara telekomunikasi}} \times 100\ \%$$

Dari Laporan Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi diperoleh jumlah menara yang melakukan pembayaran retribusi sebanyak 129 menara dari target yang ditetapkan sebanyak 130 menara atau 99,23 % .

Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Menara sebesar Rp 396.653.947,- dari target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp 395.076.000,- atau tingkat capaian sebesar 100,40 % (Bukti penerimaan PAD Retribusi Menara terlampir). Realisasi pembayaran retribusi menara telekomunikasi tahun 2022 melebihi target disebabkan karena beberapa provider menerima konsekwensi dari denda keterlambatan akibat pembayaran yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan .

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 1 Indikator 2 :

Program : Program Komunikasi dan Informasi Publik

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Monitoring Menara Telekomunikasi untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2018	50.000.000	14.583.800	29,17
2.	2019	-	-	-
3.	2020	72.080.000	71.075.000	98,61
4.	2021	-	-	-
5.	2022	5.100.000	5.100.000	100,00

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2018 – 2022

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah seperti: Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

2. Komitmen yang tinggi dari *Provider* dan pemilik menara untuk melakukan pembayaran Retribusi Menara, baik yang tahun berjalan maupun yang tertunggak/terhutang

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Menara yang Berkontribusi dan tabel perbandingan Target dan Realisasi PAD Menara Telekomunikasi untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Menara Yang Berkontribusi Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Target Jumlah Menara	Realisasi	Persentase (%)	Kategori/Keterangan
1.	2018	138 menara	0 menara	0,00	Perubahan Raperda Jasa Umum masih dalam tahap penyusunan
2.	2019	130 menara	0 menara	0,00	Perda Retribusi Menara Telekomunikasi masih pada tahap evaluasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
3.	2020	130 menara	133 menara	102,31	Sangat Tinggi
4.	2021	130 menara	130 menara	100,00	Sangat Tinggi
5.	2022	130 menara	129 menara	99,23	Sangat Tinggi

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Penerimaan Retribusi Tahun 2018 – 2022

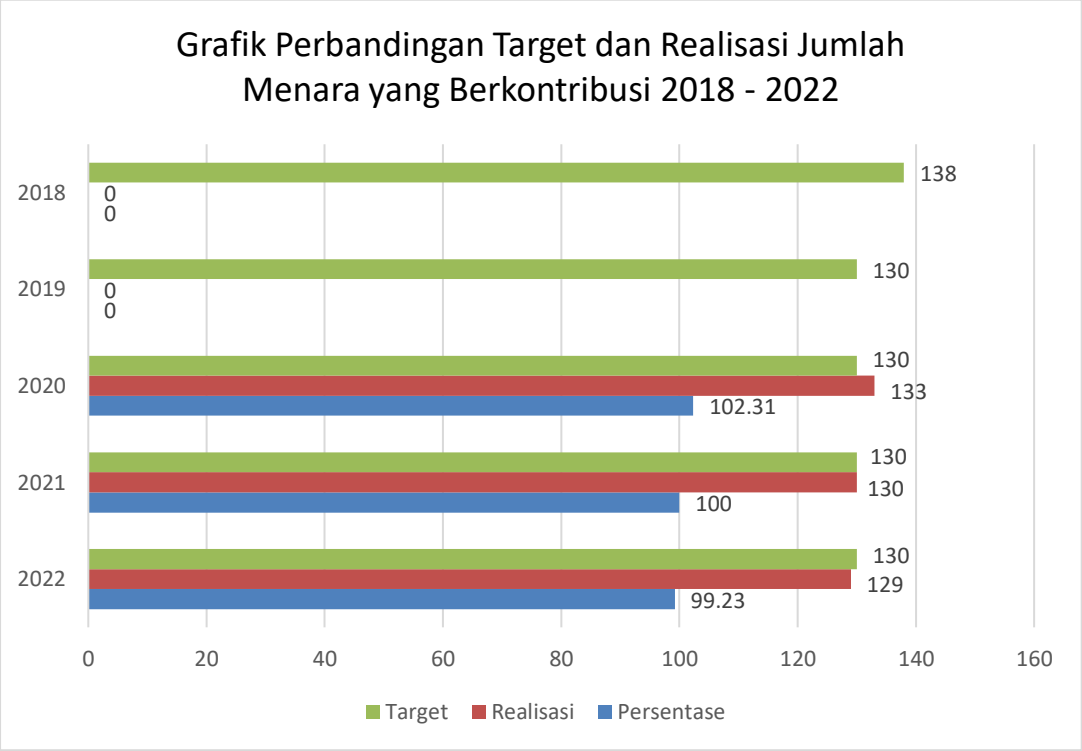

Tabel perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menara Telekomunikasi Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2018	0	0	0,00	Karena masih dalam tahap penyusunan perubahan Raperda Jasa Umum
2.	2019	386.355.000	0	0,00	Perda Retribusi Menara Telekomunikasi masih pada tahap evaluasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
3.	2020	386.355.000	1.376.556.285	356,29	Tingginya realisasi karena pembayaran retribusi yang tertunggak tahun 2017 s/d 2019 karena dasar hukum untuk penarikan retribusi menara baru selesai di akhir tahun 2019
4.	2021	404.055.000	434.625.360	107,57	Melebihi target karena adanya pembayaran retribusi menara yang terhutang tahun 2019 dan denda sebagai akibat keterlambatan pembayaran
5.	2022	395.076.000	396.653.947	100,40	Melebihi target karena adanya pembayaran denda sebagai akibat keterlambatan pembayaran

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Penerimaan Retribusi Tahun 2018 – 2022

Sasaran 2	**:**	**Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata**
Indikator 1	**:**	**Persentase media layanan informasi publik**
Indikator 2	**:**	**Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral**
Indikator 3	**:**	**Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi**

Indikator 1 : Persentase media layanan informasi publik

Persentase media layanan informasi publik adalah perbandingan jumlah media layanan umum yang digunakan meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi serta informasi dengan jumlah media layanan informasi publik dikalikan seratus persen

Didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ;

Untuk menghitung persentase media layanan informasi publik Tahun 2022 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Media layanan informasi publik yang digunakan meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi serta informasi}}{\sum \text{Media layanan informasi publik}} \times 100\ \%$$

Tahun 2022 dari target 5 media layanan informasi yang ada semuanya telah digunakan oleh pemerintah kota untuk menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Dari hasil perhitungan persentase media layanan informasi publik Tahun 2022 dapat disimpulkan dari 5 target media informasi keseluruhannya telah digunakan untuk diseminasi komunikasi serta informasi atau capaian kinerja sebesar 100 % .

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 2 Indikator 1:

Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Media Layanan Informasi Publik untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2018	189.431.000	189.431.000	100,00
2.	2019	791.335.000	788.635.000	99,66
3.	2020	477.500.000	337.589.000	70,70
4.	2021	488.000.000	485.991.054	99,59
5.	2022	940.900.000	834.586.000	88,70

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2018 – 2022

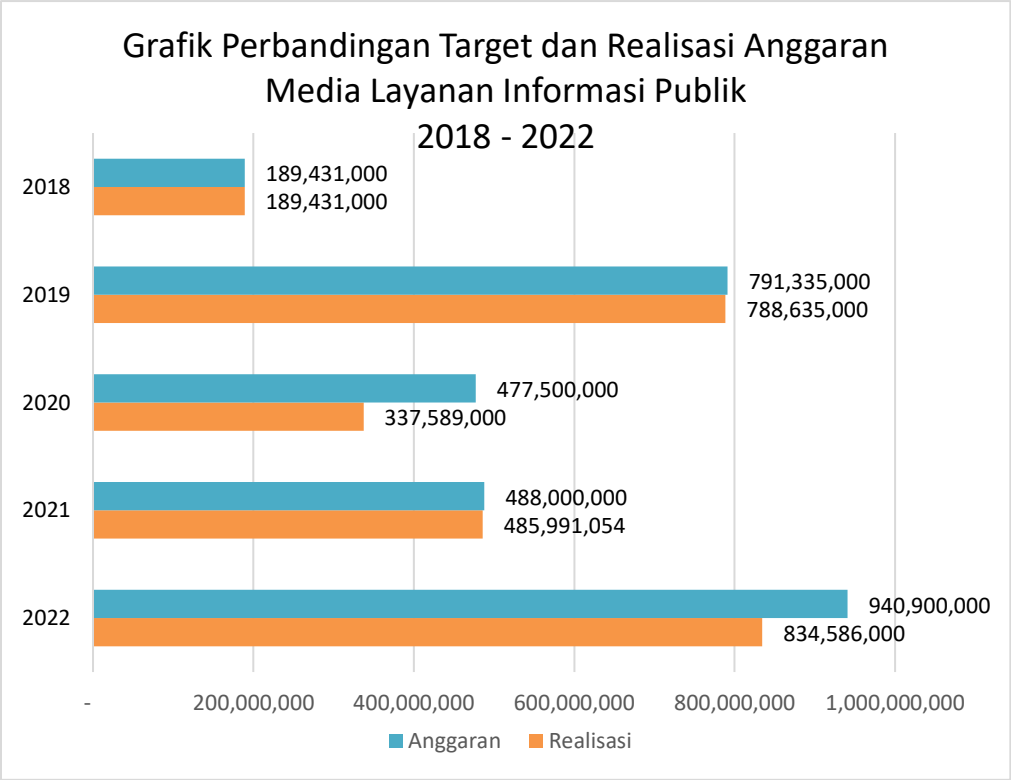

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah seperti : Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Sinergitas Pemerintah dan media telah dibangun maksimal untuk mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab sehingga penerapan layanan informasi melalui media dapat membantu masyarakat untuk memahami informasi kegiatan pembangunan daerah.

3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga layanan informasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan dengan baik

Adapun media layanan informasi yg digunakan adalah :

1. Media Massa

   Informasi disampaikan melalui surat kabar, tabloid dan majalah

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PDAM Tarakan Sabet 5 Bintang Top Business BUMD Awards 2022

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

TARAKAN SMART CITY

Wali Kota Siap Cegah Kerugian Negara

Tindaklanjuti Saran Tim Satgas Korsupgah KPK

Dua Kasus Masih Proses Kasasi

Pemkot Tarakan Raih Empat Penghargaan

2. Media Elektronik

   Informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kota disampaikan melalui media publik seperti Tarakan TV dan Equator TV .

3. Media Luar Ruang

Media luar ruang yang ada berupa spanduk, stand baleho dan videotron semuanya telah digunakan untuk penyampaian informasi pembangunan dan pelayanan pemerintah kota

4. Media Baru

Diseminasi informasi melalui media baru yang digunakan adalah media online melalui Website : www.tarakankota.go.id. dan media online lain yang dikelola DKISP seperti Facebook dan Instagram selain itu juga melalui media online pihak ketiga seperti Liputan 6.com, Merdeka.com, Tribun Kaltara.com, Fokus Borneo.com, Jendela Kaltara.com dll .

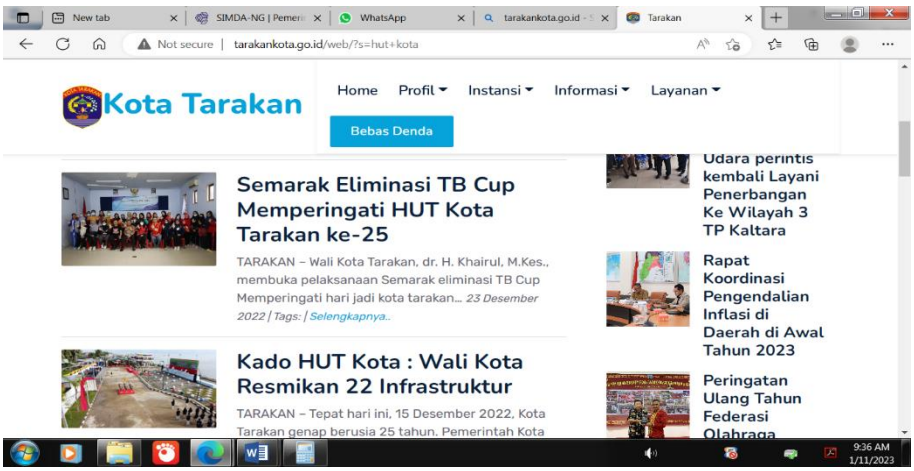

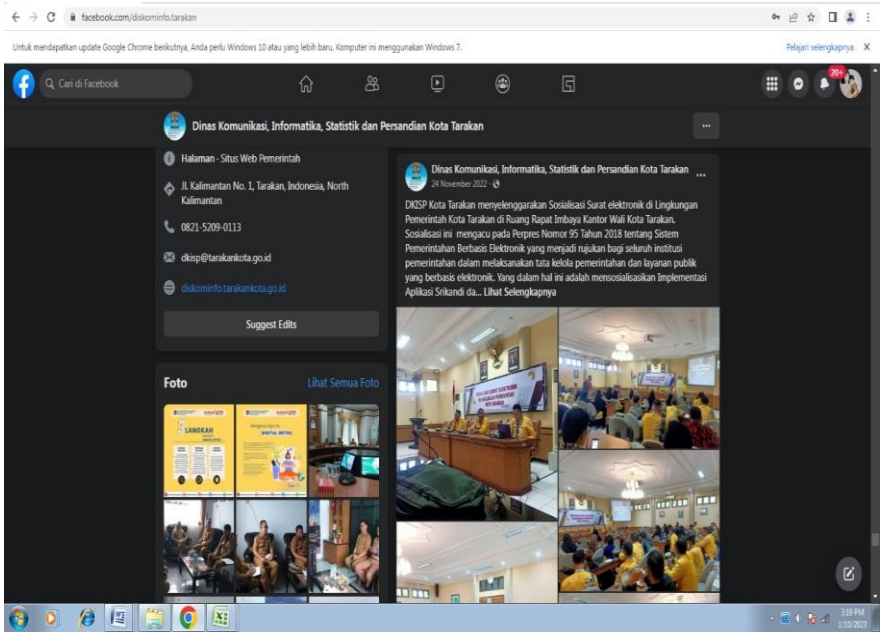
facebook.com/diskominfo.tarakan
Untuk mendapatkan update Google Chrome berikutnya, Anda perlu Windows 10 atau yang lebih baru. Komputer ini menggunakan Windows 7.
Pelajari selengkapnya
Cari di Facebook
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
Halaman · Situs Web Pemerintah
Jl. Kalimantan No. 1, Tarakan, Indonesia, North Kalimantan
0821-5209-0113
dkisp@tarakankota.go.id
diskominfo.tarakankota.go.id
Suggest Edits
Foto
Lihat Semua Foto
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
24 November 2022
DKISP Kota Tarakan menyelenggarakan Sosialisasi Surat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan di Ruang Rapat Imbaya Kantor Wali Kota Tarakan. Sosialisasi ini mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi rujukan bagi seluruh institusi pemerintahan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik. Yang dalam hal ini adalah mensosialisasikan Implementasi Aplikasi Srikandi da... Lihat Selengkapnya

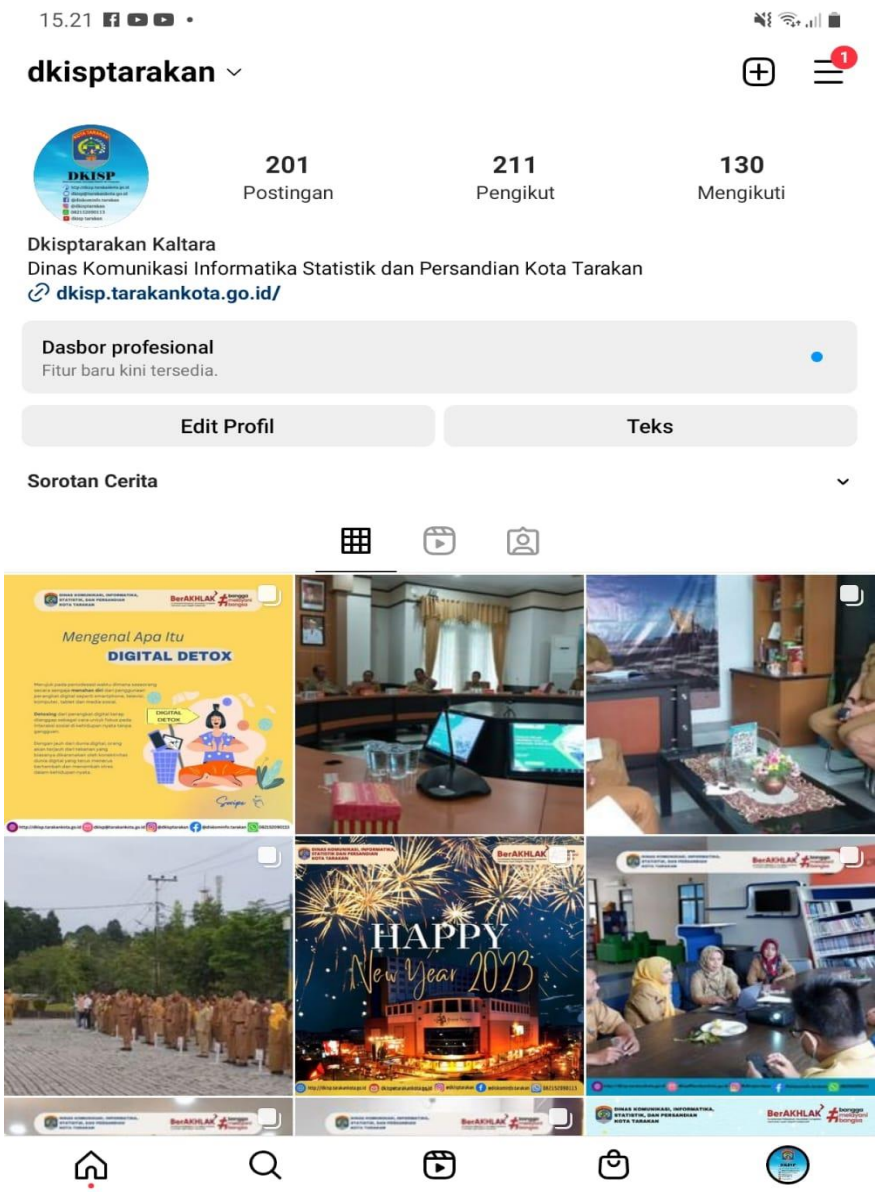
15.21
dkisptarakan
201
Postingan
211
Pengikut
130
Mengikuti
Dkisptarakan Kaltara
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan
dkisp.tarakankota.go.id/
Dasbor profesional
Fitur baru kini tersedia.
Edit Profil
Teks
Sorotan Cerita
Mengenal Apa Itu
DIGITAL DETOX
HAPPY
New Year 2023

5. Media Interpersonal

Sarana media yang dimiliki oleh DKISP berupa media center akan tetapi selama masa berlakunya aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) akibat pandemic covid-19 dan untuk tetap menjaga protokol kesehatan maka sarana tersebut dialih fungsikan untuk studio podcast dan zoom meeting sehingga dialog interaktif dengan wartawan/media maupun dengan masyarakat luas dilaksanakan secara daring/online

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Media Layanan Informasi Publik 5 tahun terakhir (2018-2022) :

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2018	4 jenis media	4 jenis media	100,00 %	1. Media massa 2. Media baru; 3. Media interpersonal 4. Media luar ruang
2.	2019	4 jenis media	4 jenis media	100,00 %	1. Media massa 2. Media baru; 3. Media interpersonal 4. Media luar ruang
3.	2020	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
4.	2021	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
5.	2022	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2018 – 2022

Beberapa kegiatan maupun informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat selama tahun 2022 melalui media layanan publik antara lain :

1. Publikasi Hari Anti Narkoba (HANI) 2022
2. Publikasi Hari Lahir Nahdatul Ulama ke 96
3. Publikasi Hari Guru dan HUT Korpri ke 51
4. Promosi kegiatan Hut Kota Tarakan ke 25

5. Publikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022

6. Kegiatan pembangunan dan pelayanan dll

Indikator 2 : Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral

Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral adalah perbandingan OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral dengan jumlah OPD dikalikan seratus persen.

Untuk menghitung persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyedian data sektoral Tahun 2022 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{OPD yang berkontribusi terhadap penyedian data sektoral}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Data Sektoral Kota Tarakan bahwa OPD yang berkontribusi sebanyak 28 OPD dari target 30 OPD atau 93,33 %, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 90,00 % .

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 2 Indikator 2 :

Program	:	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2018	0	0	0
2.	2019	0	0	0
3.	2020	24.700.000	18.665.000	75,57
4.	2021	40.000.000	32.107.500	80.27
5.	2022	39.999.500	30.639.860	76,60

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2018 – 2022

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Dilaksanakannya Forum Komunikasi Statistik Daerah (FKSD) sebagai upaya penyamaan persepsi dalam penyusunan Metadata Variabel Statistik Sektoral
3. Dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan sebagai mitra dan penyedia data statistik

Target dan realisasi OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Tahun	Target OPD	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
1.	2018	32 OPD	16 OPD	52,00 %	Rendah
2.	2019	32 OPD	20 OPD	62,50 %	Rendah
3.	2020	32 OPD	26 OPD	81,25 %	Tinggi
4.	2021	30 OPD	27 OPD	90,00 %	Sangat Tinggi
5.	2022	30 OPD	28 OPD	93,33 %	Sangat Tinggi

Sementara dari hasil kompilasi pengumpulan data telah dipublikasikan melalui pembuatan buku PDRB Menurut Lapangan Usahan, PDRB Menurut Pengeluaran, Data Statistik Sektoral Kota Tarakan Tahun 2022 dan Kota Tarakan Dalam Angka 2022 .

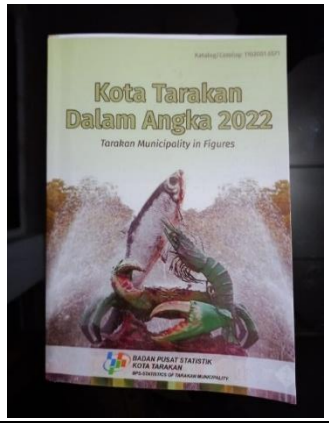

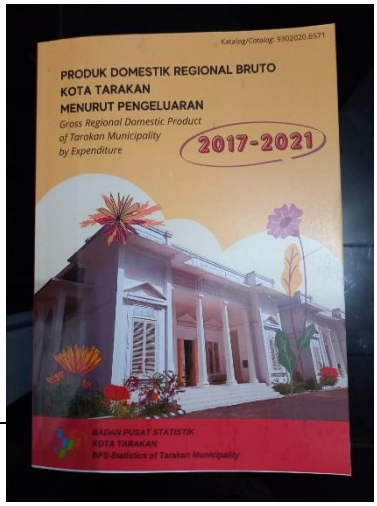

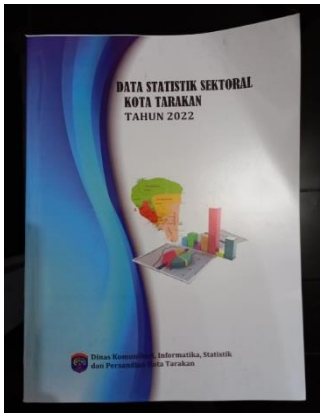

Indikator 3 : Persentase aplikasi layanan publik / tata kelola pemerintah yang terintegrasi

Persentase aplikasi layanan publik / tata kelola pemerintah yang terintegrasi adalah banyaknya aplikasi yang tersedia dan terintegrasi agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi standar pelayanan yang berada, serta pengaduan pelayanan publik, dimana peran masyarakat sebagai salah satu pengawas eksternal pelaksanaan pelayanan publik semakin penting. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Nomor Tunggal Panggilan Darurat.

Untuk menghitung aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi Tahun 2022 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{aplikasi layanan publik yang terealisasi yang digunakan OPD}}{\sum \text{aplikasi layanan publik yang dianggarkan}} \times 100\ \%$$

DKISP Kota Tarakan telah merealisasikan 4 aplikasi layanan publik pada Tahun 2022 dari target 4 aplikasi yang ditetapkan/dianggarkan atau dengan capaian kinerja 100 % .

Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan : Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Aplikasi Layanan Publik untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2018	201.060.000	201.060.000	100,00
2.	2019	691.775.000	562.366.340	81,29
3.	2020	346.250.000	267.020.000	77,12
4.	2021	514.900.000	400.062.000	77,70
5.	2022	379.509.500	335.589.736	88,43

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2018 – 2022

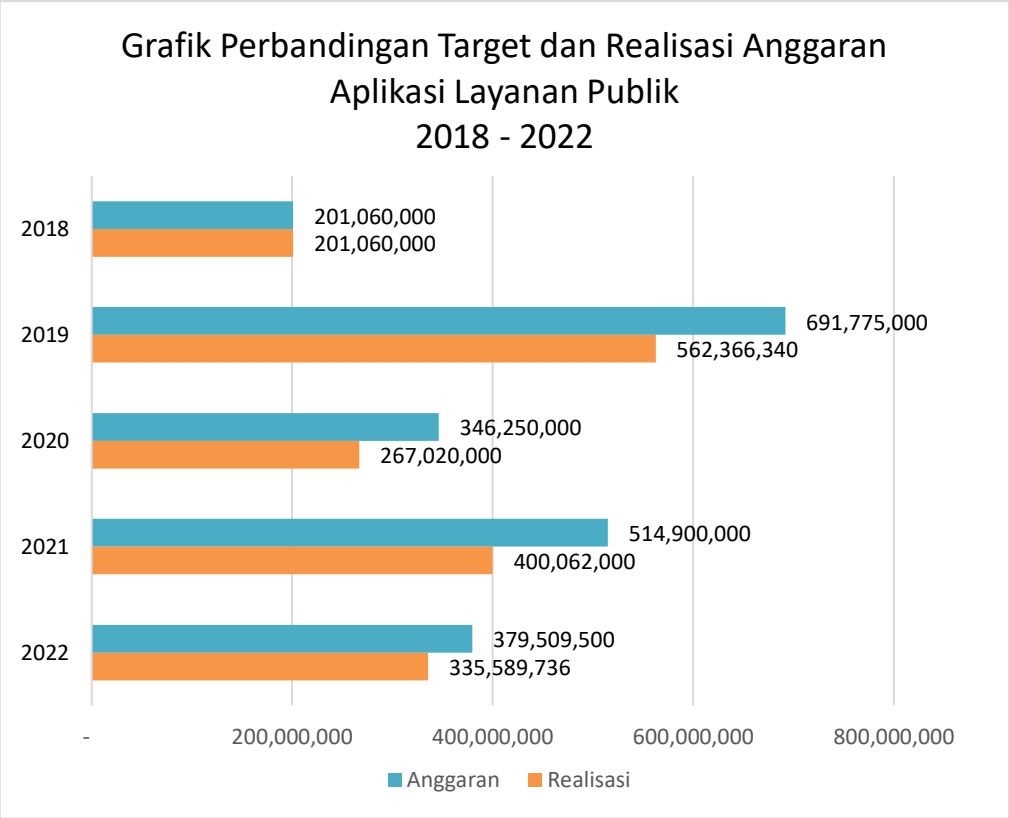

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (**SPBE**) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Nomor Tunggal Panggilan Darurat

2. Visi Kota Tarakan mewujudkan Kota Tarakan yang maju dan sejahtera melalui *Smart City* sehingga dibutuhkan ketersediaan aplikasi untuk memudahkan layanan dan informasi yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat

3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga Program/Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

Aplikasi yang dibuat, dikembangkan dan disewa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi E-Kinerja

Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Bidang Aplikasi dan Informatika DKSIP yang berisi tentang pengaturan manajemen pekerjaan dan pelaporan hasil kerja secara terintegrasi sehingga memudahkan melakukan monitoring dan pengendalian kinerja tim dalam organisasi

Screenshoot atau tangkapan layar dari aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut :

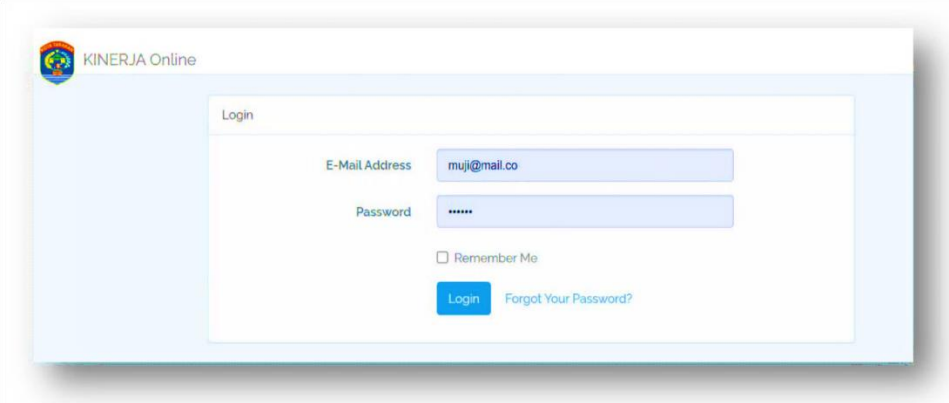

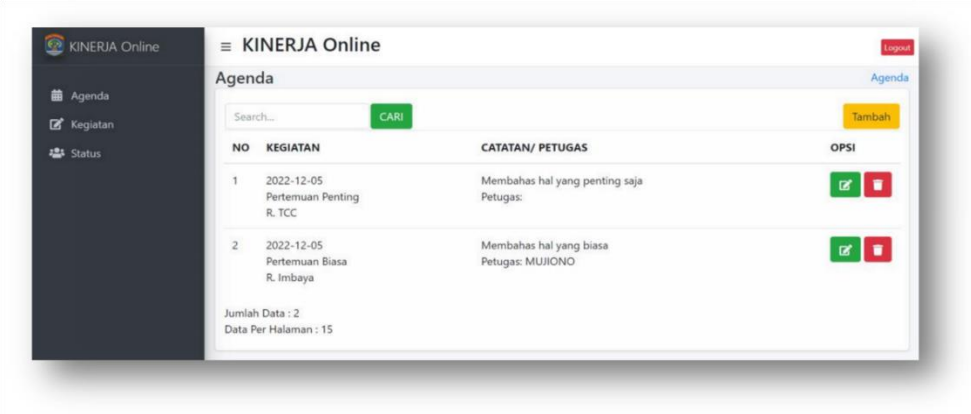

2. Aplikasi Pajak Online

Adalah pengembangan dari Aplikasi Pajak Online yang dikelola oleh Badan Pengelola, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) . *Screenshoot* atau tangkapan layar dari aplikasi pajak online dapat dilihat pada gambar berikut :

Login Aplikasi SPTPD

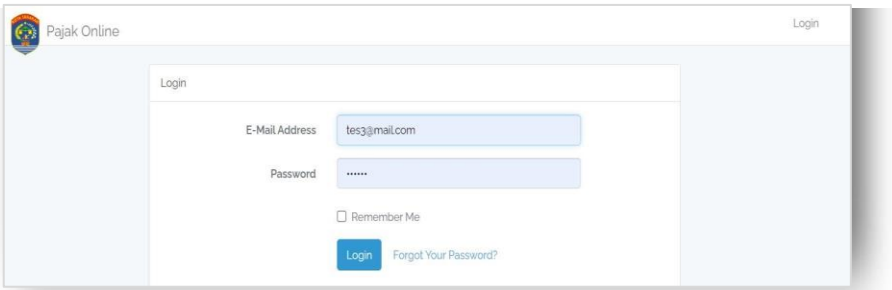

Registrasi

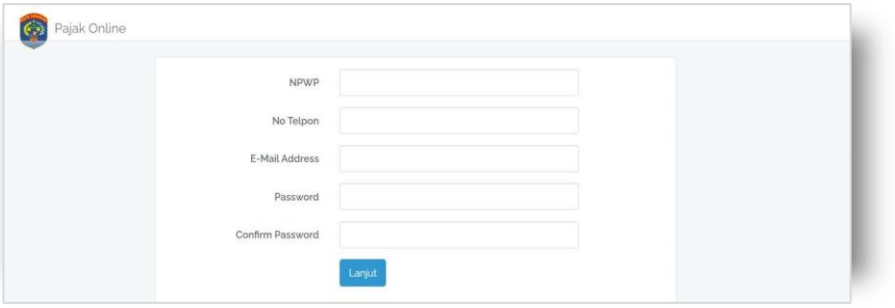

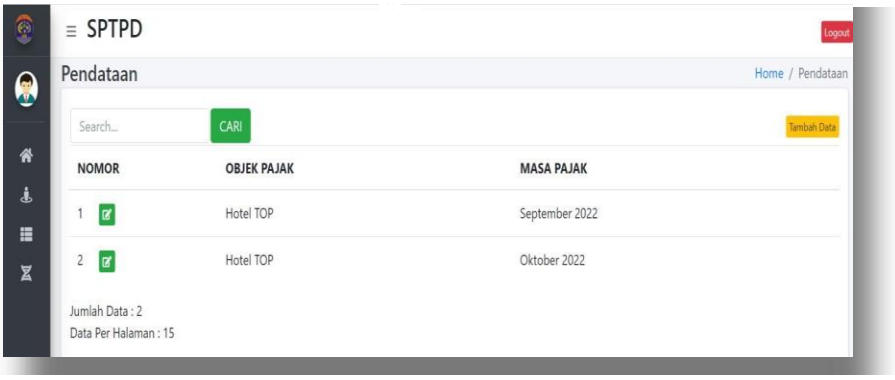

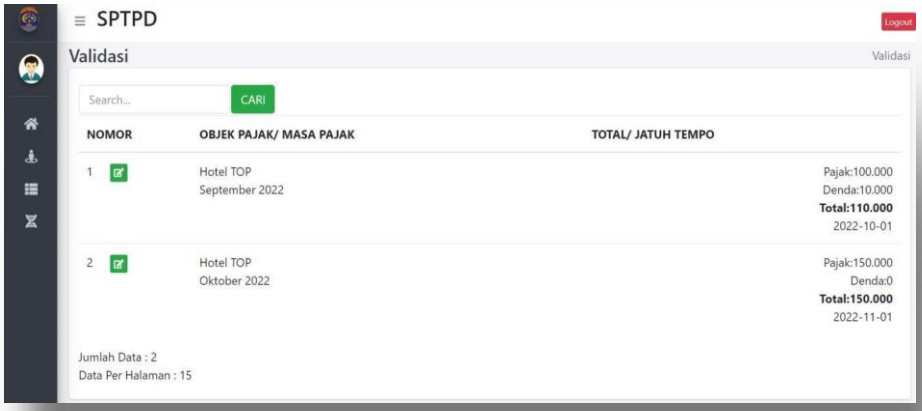
SPTPD
Logout
Validasi
Validasi
Search...
CARI
NOMOR
OBJEK PAJAK/ MASA PAJAK
TOTAL/ JATUH TEMPO
1
Hotel TOP
September 2022
Pajak:100.000
Denda:10.000
Total:110.000
2022-10-01
2
Hotel TOP
Oktober 2022
Pajak:150.000
Denda:0
Total:150.000
2022-11-01
Jumlah Data : 2
Data Per Halaman : 15

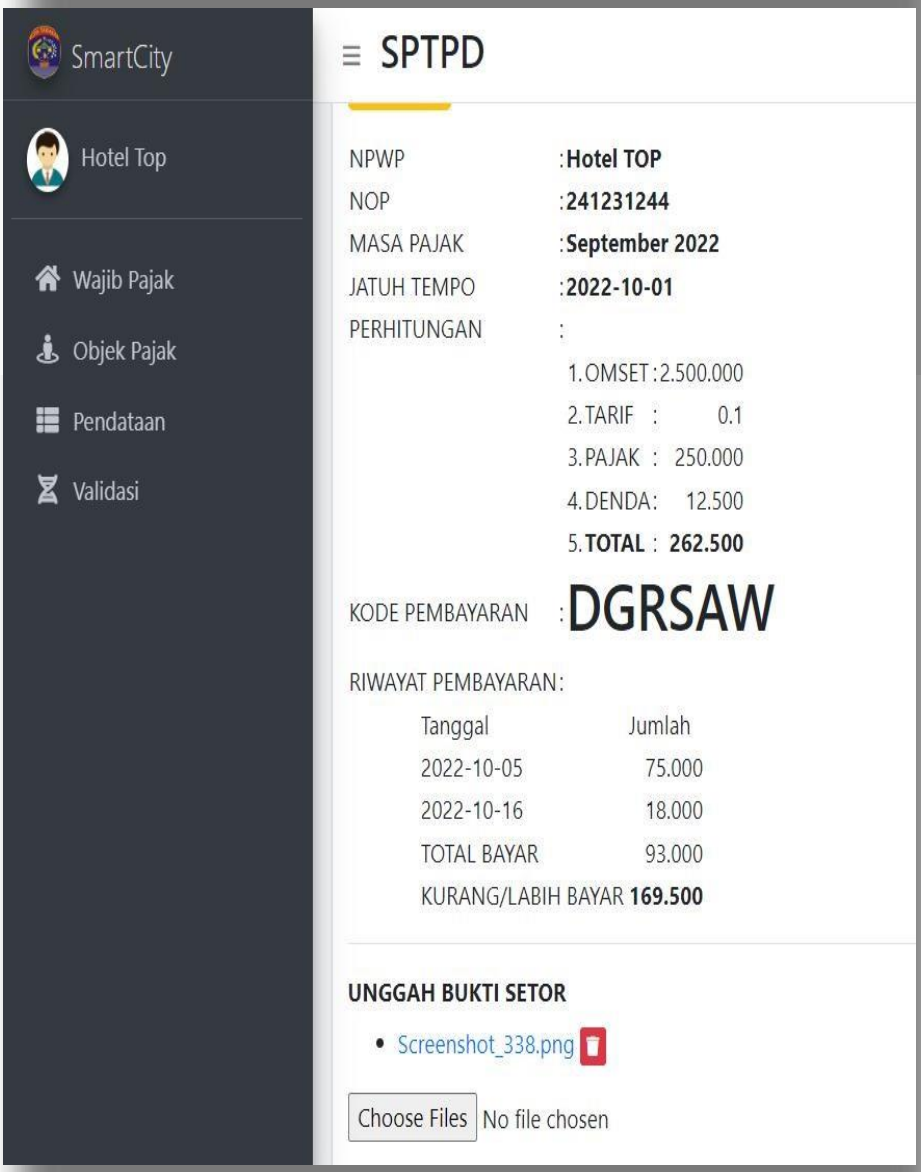
SmartCity
Hotel Top
Wajib Pajak
Objek Pajak
Pendataan
Validasi
SPTPD
NPWP :Hotel TOP
NOP :241231244
MASA PAJAK :September 2022
JATUH TEMPO :2022-10-01
PERHITUNGAN :
1. OMSET : 2.500.000
2. TARIF : 0.1
3. PAJAK : 250.000
4. DENDA : 12.500
5. TOTAL : 262.500
KODE PEMBAYARAN : DGRSAW
RIWAYAT PEMBAYARAN:
Tanggal Jumlah
2022-10-05 75.000
2022-10-16 18.000
TOTAL BAYAR 93.000
KURANG/LABIH BAYAR 169.500
UNGGAH BUKTI SETOR
Screenshot_338.png
Choose Files No file chosen

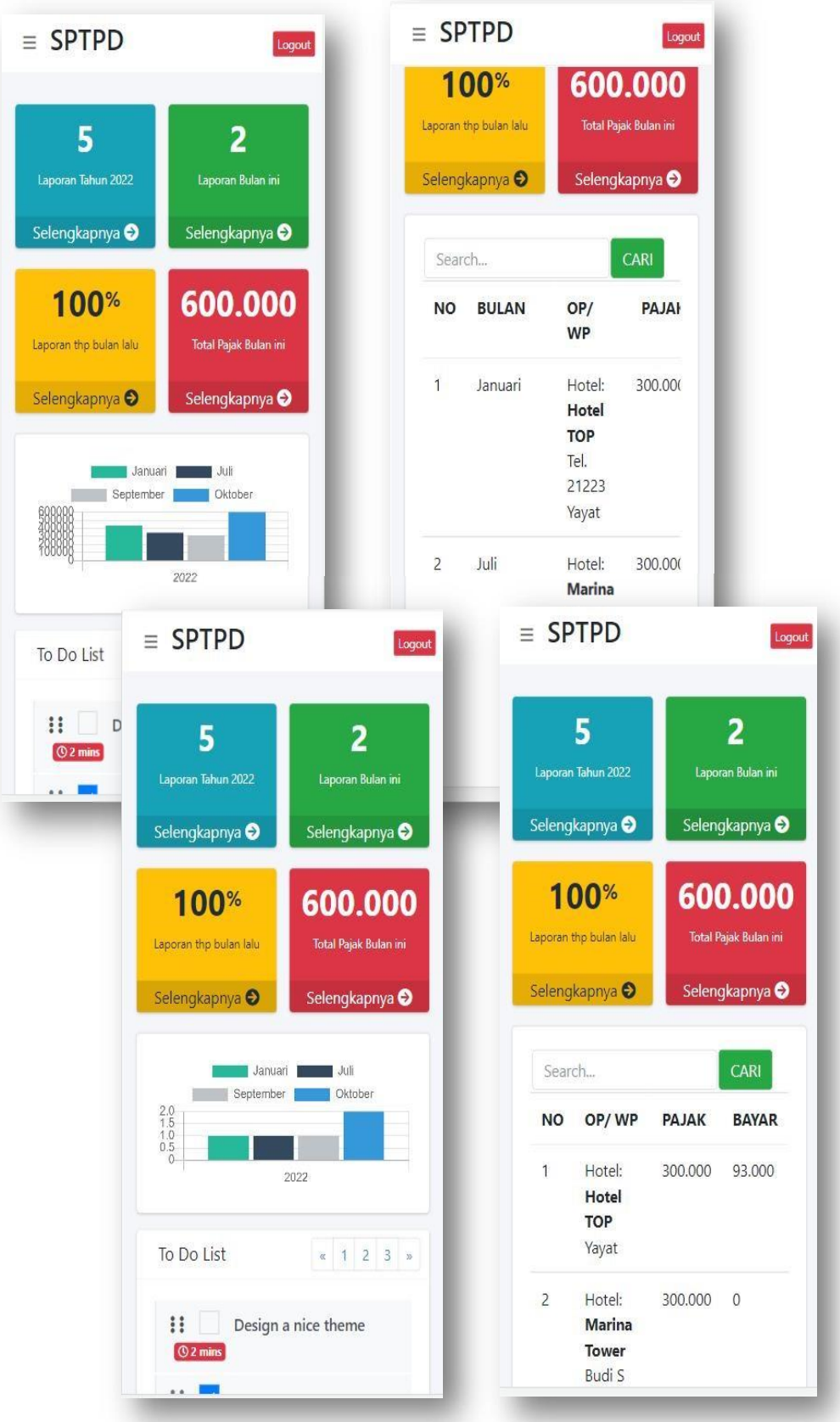
SPTPD
Logout
5
Laporan Tahun 2022
Selengkapnya
2
Laporan Bulan ini
Selengkapnya
100%
Laporan thp bulan lalu
Selengkapnya
600.000
Total Pajak Bulan ini
Selengkapnya
Januari
Juli
September
Oktober
2022
To Do List
Search...
CARI
NO
BULAN
OP/ WP
PAJAK
BAYAR
1
Januari
Hotel: Hotel TOP Tel. 21223 Yayat
300.000
93.000
2
Juli
Hotel: Marina Tower Budi S
0
Design a nice theme
2 mins

3. Aplikasi Video *Analytic*

Aplikasi untuk pemantauan CCTV di beberapa titik lokasi jalan utama di Kota Tarakan, aplikasi ini dikelola oleh UPT Tarakan Command Center (TCC)

Screenshoot atau tangkapan layar dari aplikasi video *analytic* dapat dilihat pada gambar berikut :

Selain ketiga aplikasi yang baru dibuat maupun yang dilakukan pengembangan seperti tersebut diatas, terdapat juga 1 (satu) aplikasi layanan publik dengan pengadaan sistem sewa dengan pihak ketiga yaitu :

1. aplikasi layanan call center 112

   adalah layanan 112 merupakan layanan call center 24 jam yang menghubungkan panggilan kegawat daruratan untuk pemadam kebakaran, ambulan angkut, mobil jenazah yang terintegrasi dan gratis untuk masyarakat

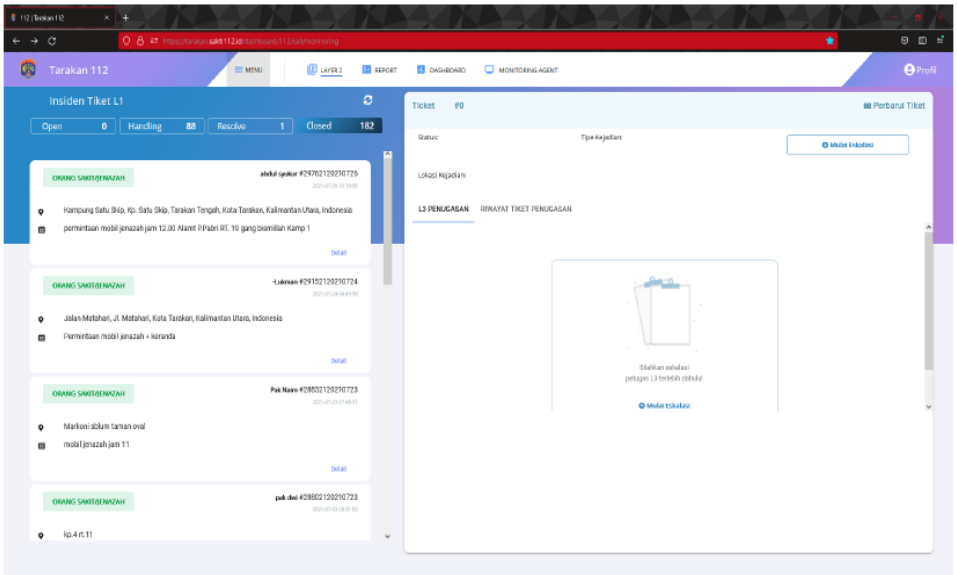

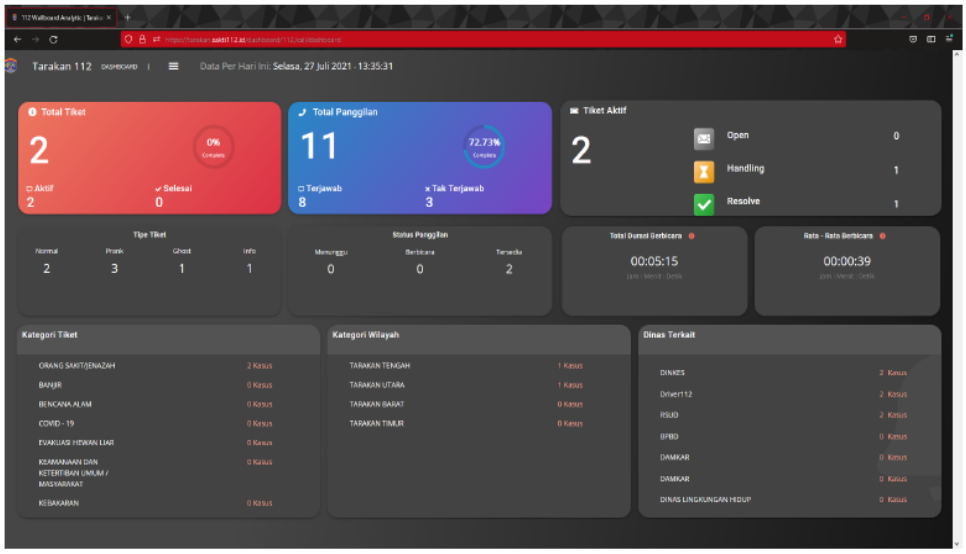

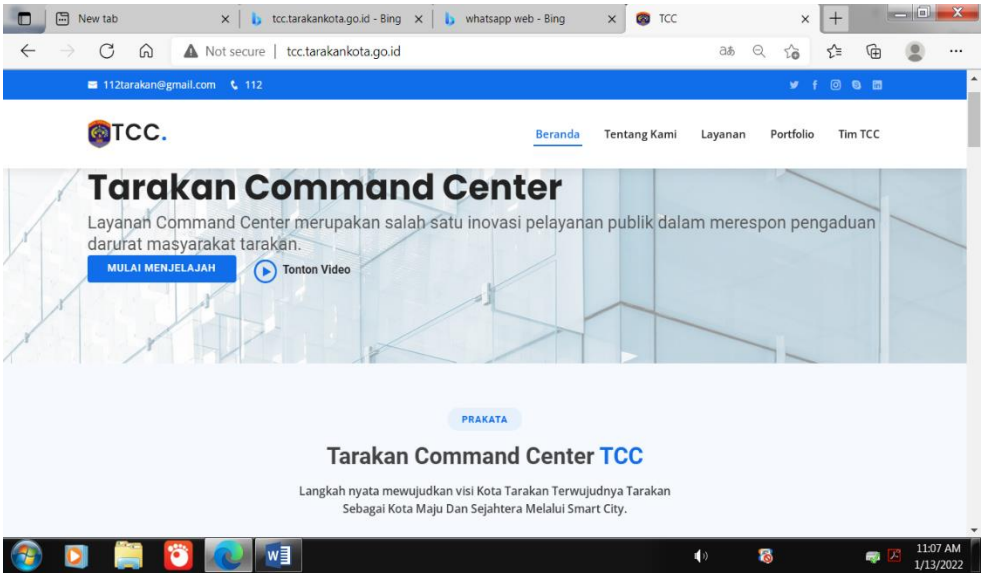
New tab
tcc.tarakankota.go.id - Bing
whatsapp web - Bing
TCC
Not secure | tcc.tarakankota.go.id
112tarakan@gmail.com 112
TCC.
Beranda
Tentang Kami
Layanan
Portfolio
Tim TCC
Tarakan Command Center
Layanan Command Center merupakan salah satu inovasi pelayanan publik dalam merespon pengaduan darurat masyarakat tarakan.
MULAI MENJELAJAH
Tonton Video
PRAKATA
Tarakan Command Center TCC
Langkah nyata mewujudkan visi Kota Tarakan Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui Smart City.
11:07 AM
1/13/2022

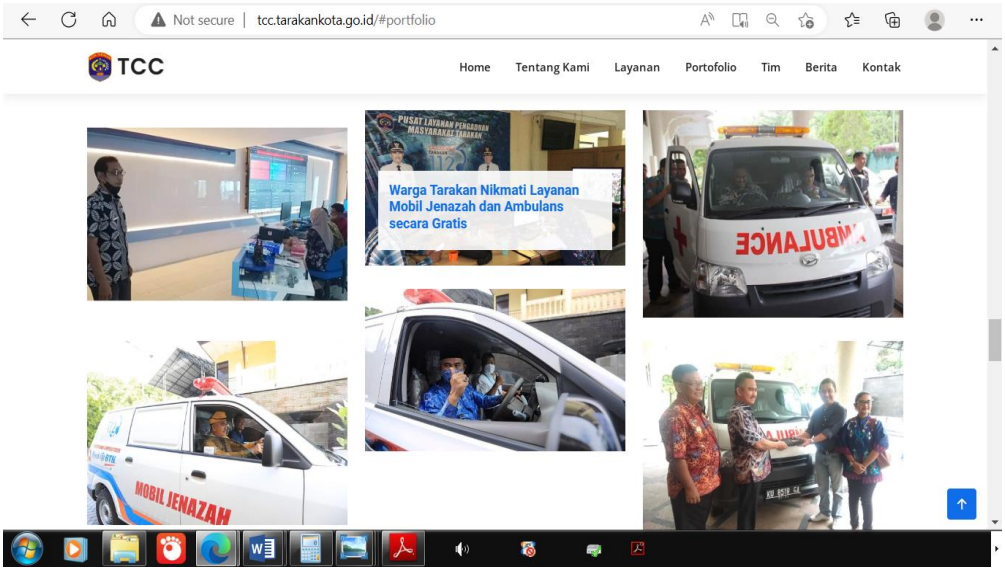
Not secure | tcc.tarakankota.go.id/#portfolio
TCC
Home
Tentang Kami
Layanan
Portofolio
Tim
Berita
Kontak
Warga Tarakan Nikmati Layanan Mobil Jenazah dan Ambulans secara Gratis
MOBIL JENAZAH

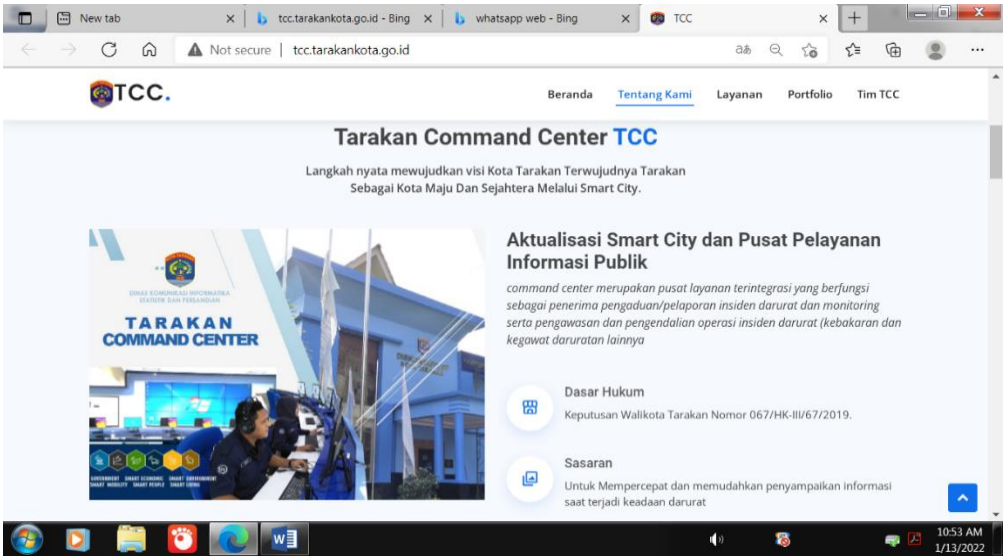
New tab
tcc.tarakankota.go.id - Bing
whatsapp web - Bing
TCC
Not secure | tcc.tarakankota.go.id
TCC.
Beranda
Tentang Kami
Layanan
Portfolio
Tim TCC
Tarakan Command Center TCC
Langkah nyata mewujudkan visi Kota Tarakan Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui Smart City.
TARAKAN COMMAND CENTER
Aktualisasi Smart City dan Pusat Pelayanan Informasi Publik
command center merupakan pusat layanan terintegrasi yang berfungsi sebagai penerima pengaduan/pelaporan insiden darurat dan monitoring serta pengawasan dan pengendalian operasi insiden darurat (kebakaran dan kegawat daruratan lainnya
Dasar Hukum
Keputusan Walikota Tarakan Nomor 067/HK-III/67/2019.
Sasaran
Untuk Mempercepat dan memudahkan penyampaikan informasi saat terjadi keadaan darurat
10:53 AM
1/13/2022

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Aplikasi Layanan Publik 5 tahun terakhir (2018-2022) :

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2018	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi Pengaduan Masyarakat/PPID dan 2. Sistem Informasi Manajemen Masyarakat (SIM Kelurahan)
2.	2019	2 Aplikasi	4 Aplikasi	200,00 %	1. Aplikasi layanan pengaduan masyarakat e-Qlue 2. Aplikasi layanan parkir dengan system Qr Code e-Parkir 3. Aplikasi Paperless System 4. Aplikasi Call Center 112 dan Fleet Management System
3.	2020	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi PPDB Online 2. Aplikasi e – presensi 3. Aplikasi e – parkir 4. Aplikasi e – perpustakaan 5. Aplikasi Perijinan DPMPTSP
4.	2021	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %	1. Pemeliharaan aplikasi PPDB Online 2. Aplikasi BPBD 3. Aplikasi Website BPKPAD 4. Aplikasi Call Center 112
5.	2022	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi E-Kinerja 2. Aplikasi Pajak Online 3. Aplikasi Video Analytic 4. Aplikasi Call Center 112

Sumber Data : Laporan Bidang Aplikasi dan Informatika DKISP

Sasaran 3	**:**	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik**
Indikator 1	**:**	**Nilai/Predikat Sakip**

Indikator 1 : Nilai/Predikat Sakip

Nilai/Predikat Sakip adalah nilai atau predikat dari Laporan Hasil Evaluasi Sakip yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan

Untuk Nilai LHE Sakip Tahun 2022 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{nilai LHE Sakip}}{\sum \text{target yang ditetapkan}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi nilai Sakip DKISP adalah 65,41 atau dengan predikat B dari target yang ditetapkan sebesar 70/B atau tingkat capaian sebesar 93,44 %, penyebab tidak tercapainya target LHE Sakip antara lain :

1. Penetapan Target Keberhasilan belum sesuai dengan Indikator Tujuan.
2. Belum semua dokumen perencanaan dan keuangan dipublikasikan pada Website resmi PD atau Website Pemerintah Kota Tarakan yang dapat memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses .
3. Evaluasi internal belum sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
4. Dokumen LKIP belum didukung basis data yang kompeten yang dapat diverifikasi, ditelusuri sumber datanya dan *up to date* .

Untuk data LHE yang digunakan adalah nilai LHE Sakip tahun 2021 yang penilaiannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan .

Target dan Realisasi Nilai Sakip dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Tahun	Target Nilai/Predikat	Realisasi Nilai/Predikat	Keterangan
1.	2018	-	-	Belum ada Penilaian Sakip
2.	2019	65/B	59.99/CC	
3.	2020	65/B	63.80/B	
4.	2021	65/B	50.48/CC	
5.	2022	70/B	65.41/B	

Sumber data : LHE Sakip Tahun 2019 – 2022

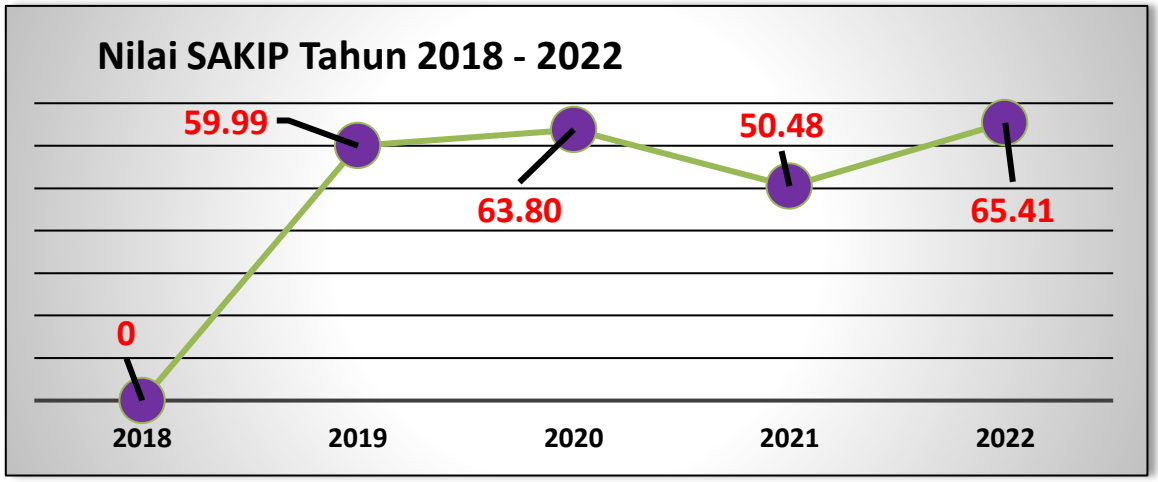

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

   Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja (Perangkat Daerah) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase PD yang terlayani infrastruktur jaringan	30 PD	30 PD	100,00 %
		Persentase kontribusi provider telekomunikasi	130 Tower	129 Tower	99,23 %
2	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Persentase media layanan informasi publik	5 Jenis	5 Jenis	100,00 %
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	30 OPD	28 OPD	93,33 %
		Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %
3	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai/Predikat Sakip	70/B	65,41/B	93,44 %
CAPAIAN KINERJA					**97.67%**

Tabel 3.5

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket.
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	100,00 %	509.520.000	450.035.180	88,33	Efisien
		Persentase kontribusi provider telekomunikasi	99,23 %	5.100.000	5.100.000	100,00	Efisien
2	Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	Persentase media layanan informasi publik	100,00 %	940.900.000	834.586.000	88,70	Efisien
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	93,33 %	39.999.500	30.639.800	76,60	Efisien
		Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	100,00 %	379.509.500	335.589.736	88,43	Efisien
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	Nilai/Predikat Sakip	93,44 %	4.625.855.800	4.455.217.377	96,31	Efisien
Total Capaian			**97,67 %**	**6.500.884.800**	**6.111.168.153**	**94,01**	**Efisien**

Tabel 3.6
Analisis Dukungan SDM dalam
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dukungan Personil Pencapaian Sasaran		Jumlah
			ASN	Non ASN	
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase PD yang terlayani infrastruktur jaringan	5	-	5
		Persentase kontribusi provider telekomunikasi	2	1	3
2	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Persentase media layanan informasi publik	3	-	3
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	3	-	3
		Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	7	22	29
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	Nilai/Predikat Sakip	9	6	15
Jumlah			29	29	58

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Outcome/Output	Keuangan		Capaian (%)
					Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Sasaran I : Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan						
	1.	Program Aplikasi Informatika					
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		a.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kapasitas bandwith server	509.520.000	450.035.180	88,33
	2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik					
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		a.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kontribusi provider Menara telekomunikasi	5.100.000	5.100.000	100,00
	Jumlah Sasaran I				**514.620.000**	**455.135.180**	**88,44**
II.	Sasaran II : Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata						
	1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik					
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		a.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah advertorial pada media cetak, elektronik dan online	896.000.000	789.738.000	88,14
		b.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah cover baleho, spanduk dan pemeliharaan stand baleho	40.000.000	39.948.000	99,87
		c.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan PPID	4.900.000	4.900.000	100,00
	2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					

		a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah jenis buku data dan statistik daerah	24.999.820	17.981.600	71,93
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah jenis buku statistik sektoral	4.999.840	4.845.600	96,92
		b.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan dan Rakor FKSD Regional dan Pusat	9.999.940	7.812.660	78,13
	3.	Program Aplikasi Informatika					
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		a.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah jenis aplikasi layanan publik	70.000.000	36.948.886	52,78
		b.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah jenis layanan publik	309.509.500	298.640.850	96,49
	Jumlah Sasaran II				**1.360.409.000**	**1.200.815.596**	**88,27**
III.	Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP						
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang mendapatkan gaji tepat waktu	3.900.000.000	3.757.341.041	96,34
		b.	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah bulan ASN yang mendapatkan tunjangan keuangan	58.076.000	58.076.000	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penyediaan instalasi listrik penerangan bangunan kantor	2.991.300	2.978.000	99,56
		b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih	29.194.760	27.806.690	95,25
		c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan	7.999.700	7.958.360	99,48

		d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.870.400	18.743.701	94,33
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman	2.500.000	2.308.000	92,32
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan dasar energi	350.000.000	340.730.025	97,35
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengurusan perpanjangan surat kendaraan bermotor; Jumlah Liter BBM / Oli yang diadakan; Jumlah jenis suku cadang; Jumlah jenis service	220.000.000	209.370.240	95,17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	9.960.000	9.960.000	100,00
	2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		a.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi tanda tangan elektronik	9.999.780	9.180.000	91,80
		b.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi surat elektronik	8.263.920	4.812.660	58,24
		c.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelatihan persandian	6.999.940	5.952.660	85,04
	Jumlah Sasaran III				**4.625.855.800**	**4.455.217.377**	**96,31**
	Total target, realisasi dan capaian anggaran				**6.500.884.800**	**6.111.168.153**	**94.01**

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran strategis sebesar **Rp. 6.500.884.800,-** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 6.111.168.153,-** sehingga serapan capaian menunjukkan angka **94,01** %.

Selanjutnya untuk perbandingan anggaran dari masing-masing sasaran strategis dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Anggaran Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Strategis I	514.620.000	455.135.180	88,44
2	Strategis II	1.360.409.000	1.200.815.596	88,27
3	Strategis III	4.625.855.800	4.455.217.377	96,31
Total Capaian		6.500.884.800	6.111.168.153	94,01

Perbandingan anggaran, realisasi, sisa anggaran dan persentase capaian realisasi anggaran pada Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2018 s/d 2022, diisajikan dalam tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Anggaran dan Rekapitulasi
Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase realisasi(%)
1	2018	5,661,438,327	4,649,911,467	1,011,526,860	82,13
2	2019	6.296.175.602	5.660.770.659	635.404.943	89,91
3	2020	7.010.101.075	6.359.277.130	650.823.945	90,72
4	2021	6.436.615.087	5.504.052.973	932.562.114	85,51
5	2022	6.500.884.800	6.111.168.153	389.716.647	94.01

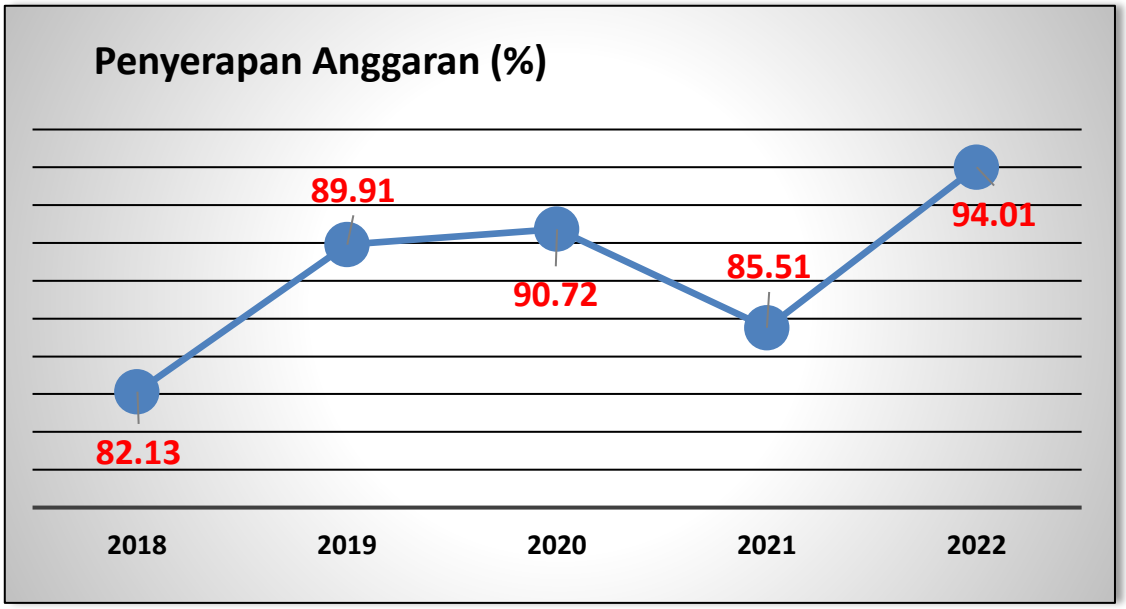

Grafik Trend Penyerapan Anggaran tahun 2018 – 2022 DKISP Kota Tarakan

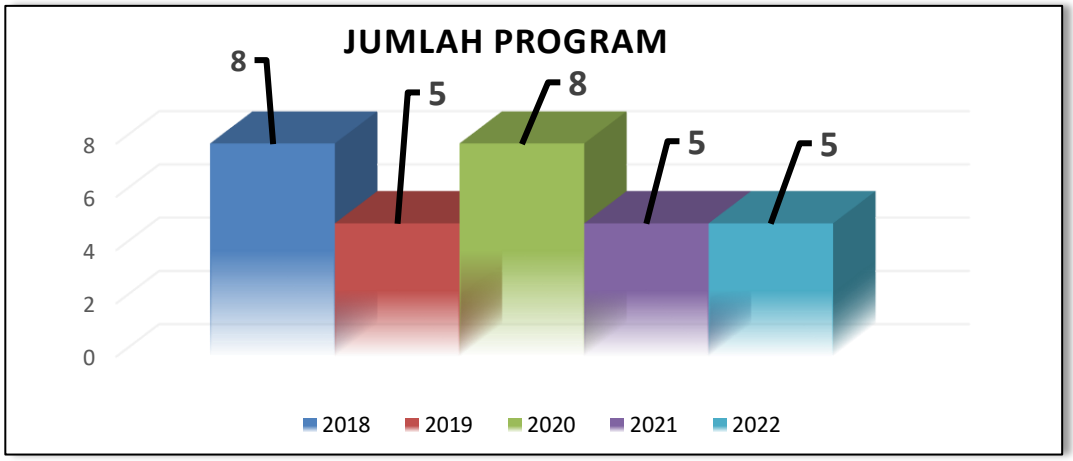

Grafik Trend Jumlah Program Tahun 2018 – 2022 DKISP Kota Tarakan

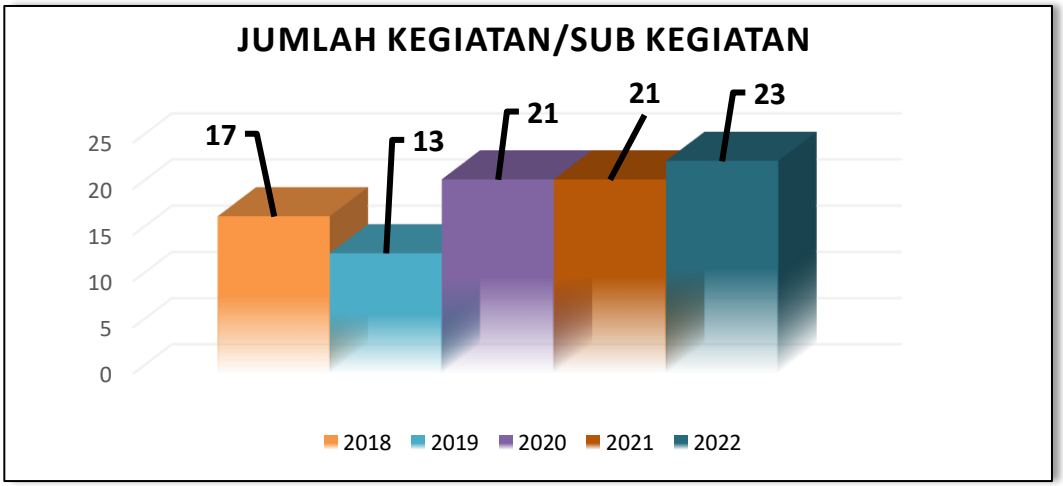

Grafik Trend Jumlah Kegiatan Tahun 2018 - 2022 DKISP Kota Tarakan

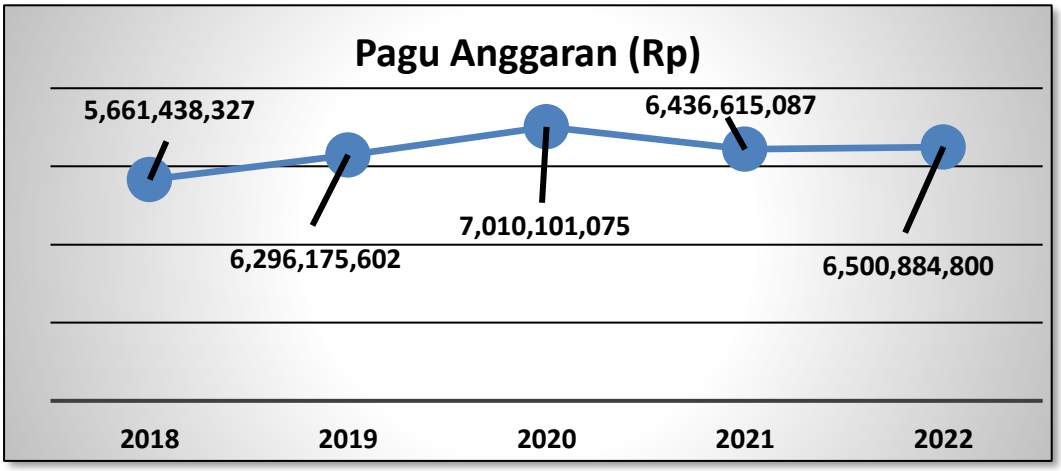

Grafik Trend Pagu Anggaran Tahun 2018 – 2022 DKISP Kota Tarakan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2020 yang terdiri dari 3 sasaran dan 6 Indikator, adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja 90 ≥ 100 % kategori “sangat tinggi” sebanyak 3 sasaran atau 6 indikator dengan capaian 97,67 %; bahkan beberapa telah melampaui batas maksimal keberhasilan;

B. Tindak Lanjut Perbaikan dan Peningkatan Kinerja

1. Menetapkan Target Keberhasilan sesuai dengan Indikator Tujuan .

2. Dokumen LKIP akan dijadikan bahan evaluasi didalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya .

3. Dokumen LKIP akan dipublikasikan pada Website resmi DKISP Kota Tarakan dengan laman http://dkisp.tarakankota.go.id/ sehingga memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses atau memperoleh informasi .

4. Melakukan evaluasi internal sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan .

5. Melengkapi dokumen LKIP dengan didukung basis data yang kompeten dan dapat diverifikasi, ditelusuri sumber datanya serta up to date .

LAMPIRAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA REKAPITULASI SKPD
Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022	
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2022	
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**		
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp395.076.000**	**Rp395.076.000**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp395.076.000	Rp395.076.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp395.076.000**	**Rp395.076.000**
5			**BELANJA DAERAH**		
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp6.256.507.700**	**Rp6.292.375.300**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.958.086.000	Rp3.958.076.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.298.421.700	Rp2.334.299.300
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp244.509.500**	**Rp208.509.500**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp53.350.000	Rp68.350.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp121.159.500	Rp121.159.500
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp70.000.000	Rp19.000.000
			Jumlah Belanja	**Rp6.501.017.200**	**Rp6.500.884.800**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp6.105.941.200)**	**(Rp6.105.808.800)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp522.256.300
Februari	Rp0	Februari	Rp666.721.800
Maret	Rp0	Maret	Rp740.390.000
April	Rp0	April	Rp913.933.720
Mei	Rp100.000.000	Mei	Rp526.098.800
Juni	Rp100.000.000	Juni	Rp715.540.300
Juli	Rp50.000.000	Juli	Rp563.751.970
Agustus	Rp100.000.000	Agustus	Rp505.167.510
September	Rp45.076.000	September	Rp463.738.800
Oktober	Rp0	Oktober	Rp475.098.800
November	Rp0	November	Rp314.931.253
Desember	Rp0	Desember	Rp93.255.547
Jumlah	Rp395.076.000	Jumlah	Rp6.500.884.800

Tarakan, tanggal 30 September 2022
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

dr. Witoyo
NIP: 196501112000121002

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kustriansyah, SE
NIP: 196403281985031011

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD
Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2022

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp395.076.000**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp395.076.000**	**Rp0**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp395.076.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp395.076.000**	**Rp0**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp395.076.000**	**Retribusi Daerah**				**Rp395.076.000**	**Rp0**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp395.076.000**	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp395.076.000**	**Rp0**
4.1.02.01.13	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**				**Rp395.076.000**	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**				**Rp395.076.000**	**Rp0**
4.1.02.01.13.0001	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**				**Rp395.076.000**	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**				**Rp395.076.000**	**Rp0**
	:: Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi					**:: Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**					
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1 Tahun	Tahun	Rp395.076.000	Rp395.076.000	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1 Tahun	Tahun	Rp395.076.000	Rp395.076.000	Rp0
				Jumlah	**Rp395.076.000**				**Jumlah**	**Rp395.076.000**	**Rp0**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2022

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**6.191.244.560**	**244.509.500**	**0**	**0**	**6.435.754.060**	**6.227.112.160**	**208.509.500**	**0**	**0**	**6.435.621.660**	**(132.400)**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.600.724.560**	**0**	**0**	**0**	**4.600.724.560**	**4.600.592.160**	**0**	**0**	**0**	**4.600.592.160**	**(132.400)**	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.958.086.000**	**0**	**0**	**0**	**3.958.086.000**	**3.958.076.000**	**0**	**0**	**0**	**3.958.076.000**	**(10.000)**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.900.000.000	0	0	0	3.900.000.000	3.900.000.000	0	0	0	3.900.000.000	0	
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.086.000	0	0	0	58.086.000	58.076.000	0	0	0	58.076.000	(10.000)	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**60.178.560**	**0**	**0**	**0**	**60.178.560**	**60.056.160**	**0**	**0**	**0**	**60.056.160**	**(122.400)**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.991.300	0	0	0	2.991.300	2.991.300	0	0	0	2.991.300	0	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.194.760	0	0	0	29.194.760	29.194.760	0	0	0	29.194.760	0	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.999.700	0	0	0	7.999.700	7.999.700	0	0	0	7.999.700	0	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.992.800	0	0	0	19.992.800	19.870.400	0	0	0	19.870.400	(122.400)	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**352.500.000**	**0**	**0**	**0**	**352.500.000**	**352.500.000**	**0**	**0**	**0**	**352.500.000**	**0**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350.000.000	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**229.960.000**	**0**	**0**	**0**	**229.960.000**	**229.960.000**	**0**	**0**	**0**	**229.960.000**	**0**	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		220.000.000	0	0	0	220.000.000	220.000.000	0	0	0	220.000.000	0	
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.960.000	0	0	0	9.960.000	9.960.000	0	0	0	9.960.000	0	
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**946.000.000**	**946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**946.000.000**	**0**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**946.000.000**	**946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**946.000.000**	**0**	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		896.000.000	0	0	0	896.000.000	896.000.000	0	0	0	896.000.000	0	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.900.000	0	0	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.100.000	0	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0	0	5.100.000	0	
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**				**644.520.000**	**244.509.500**	**0**	**0**	**889.029.500**	**680.520.000**	**208.509.500**	**0**	**0**	**889.029.500**	**0**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**644.520.000**	**244.509.500**	**0**	**0**	**889.029.500**	**680.520.000**	**208.509.500**	**0**	**0**	**889.029.500**	**0**	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	70.000.000	0	0	70.000.000	51.000.000	19.000.000	0	0	70.000.000	0	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135.000.000	174.509.500	0	0	309.509.500	135.000.000	174.509.500	0	0	309.509.500	0	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		509.520.000	0	0	0	509.520.000	494.520.000	15.000.000	0	0	509.520.000	0	
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**39.999.500**	**0**	**0**	**0**	**39.999.500**	**39.999.500**	**0**	**0**	**0**	**39.999.500**	**0**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**39.999.500**	**0**	**0**	**0**	**39.999.500**	**39.999.500**	**0**	**0**	**0**	**39.999.500**	**0**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**39.999.500**	**0**	**0**	**0**	**39.999.500**	**39.999.500**	**0**	**0**	**0**	**39.999.500**	**0**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.999.820	0	0	0	24.999.820	24.999.820	0	0	0	24.999.820	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.999.840	0	0	0	4.999.840	4.999.840	0	0	0	4.999.840	0	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.999.840	0	0	0	9.999.840	9.999.840	0	0	0	9.999.840	0	
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**25.263.640**	**0**	**0**	**0**	**25.263.640**	**25.263.640**	**0**	**0**	**0**	**25.263.640**	**0**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**25.263.640**	**0**	**0**	**0**	**25.263.640**	**25.263.640**	**0**	**0**	**0**	**25.263.640**	**0**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**25.263.640**	**0**	**0**	**0**	**25.263.640**	**25.263.640**	**0**	**0**	**0**	**25.263.640**	**0**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.999.780	0	0	0	9.999.780	9.999.780	0	0	0	9.999.780	0	
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.263.920	0	0	0	8.263.920	8.263.920	0	0	0	8.263.920	0	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.999.940	0	0	0	6.999.940	6.999.940	0	0	0	6.999.940	0	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA

SKPD : 2-16.2-21.2-20.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Unit Organisasi : 2-16.2-21.2-20.01.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	**PENDAPATAN DAERAH**	395.076.000,00	396.653.947,00	100,40	434.625.360,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	395.076.000,00	396.653.947,00	100,40	434.625.360,00
4.1.02	**Retribusi Daerah**	395.076.000,00	396.653.947,00	100,40	434.625.360,00
5	**BELANJA DAERAH**	6.500.884.800,00	6.111.168.153,00	94,01	5.504.052.973,00
5.1	**BELANJA OPERASI**	6.292.375.300,00	5.923.857.303,00	94,14	5.183.785.973,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**	3.958.076.000,00	3.815.417.041,00	96,40	3.619.214.686,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	2.334.299.300,00	2.108.440.262,00	90,32	1.564.571.287,00
5.2	**BELANJA MODAL**	208.509.500,00	187.310.850,00	89,83	320.267.000,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	68.350.000,00	68.169.000,00	99,74	296.467.000,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	121.159.500,00	119.141.850,00	98,33	0,00
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	19.000.000,00	0,00	0,00	23.800.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(6.105.808.800,00)	(5.714.514.206,00)	0	(5.069.427.613,00)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(6.105.808.800,00)**	**(5.714.514.206,00)**	**0**	**(5.069.427.613,00)**

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENERIMAAN
Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
10-05-2022	01/BP-Menara/I/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.993.000,00		2.993.000,00
	01/STS-MENARA/V/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		2.993.000,00	0,00
07-06-2022	02/BP-Menara/I/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	59.860.000,00		59.860.000,00
	02/STS-MENARA/VI/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		59.860.000,00	0,00
07-07-2022	03/BP-MENARA/VII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.986.000,00		5.986.000,00
11-07-2022	03/STS-MENARA/VII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		5.986.000,00	0,00
	04/BP-MENARA/VII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	107.748.000,00		107.748.000,00
	04/STS-MENARA/VII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		107.748.000,00	0,00
14-07-2022	06/BP-MENARA/VII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	26.937.000,00		26.937.000,00
	06/STS-MENARA/VII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		26.937.000,00	0,00
15-07-2022	05/BP-MENARA/VII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.215.780,00		70.215.780,00
	05/STS-MENARA/VII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		70.215.780,00	0,00
11-10-2022	07/BP-MENARA/X/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	53.874.000,00		53.874.000,00
	07/STS-MENARA//2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		53.874.000,00	0,00
	08/BP-MENARA/X/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.986.000,00		5.986.000,00
	08/STS-MENARA//2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		5.986.000,00	0,00
	09/BP-MENARA/X/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	44.895.000,00		44.895.000,00
	09/STS-MENARA/X/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		44.895.000,00	0,00
19-12-2022	011/BP-MENARA/XII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.159.167,00		18.159.167,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	011/STS-MENARA/XII/2022	4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		18.159.167,00	0,00
Jumlah periode ini				396.653.947,00	396.653.947,00	
Jumlah sampai periode lalu				0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini				396.653.947,00	396.653.947,00	
Sisa Kas						0,00

Pada hari ini tanggal 31 Desember 2022

oleh kami didapat dalam kas Rp 0,00

(rupiah)

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Kalimantan No.1 Telp. (0551) 34200 Fax. (0551) 22040
Web site : http://www.tarakankota.go.id E-mail:diskominfo@tarakankota.go.id
T A R A K A N (Kode Pos 77131)

PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG STATISTIK TAHUN 2022
(Kelengkapan Metadata Variabel Sektoral)

I. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral

NO	NAMA OPD	JENIS VARIABEL STATISTIK SEKTORAL	JUMLAH VARIABEL
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Laporan Statistik LAMPID, Tahun 2021 2. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2021 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2021 4. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan, Tahun 2021 5. Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Cacat, Tahun 2021 6. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah, Tahun 2021 7. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan, Tahun 2021 8. Jumlah Penduduk Menurut Agama, Tahun2021 9. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akta, Tahun 2021 10. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan, Tahun 2021 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 17 Tahun Keatas, Tahun 2021	11 Variabel
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan Dan Jenis Kelamin, Tahun 2021 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Jenis Kelamin, Tahun 2021 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Jenis Kelamin, Tahun 2021`	3 Variabel
3	DPRD Kota Tarakan	1. Jumlah Anggota DPRD Kota Tarakan Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin,Tahun 2021 2. Jumlah Keputusan DPRD Kota Tarakan Menurut Jenis Keputusan,Tahun 2019-2021 3. Jumlah Persidangan DPRD Kota Tarakan Menurut Jenis Persidangan, Tahun 2021	3 Variabel

4	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Penyandang Disabilitas per-Kecamatan Di Kota Tarakan, Tahun 2021 2. Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan Di Kota Tarakan,Tahun 2021 3. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Tarakan,Tahun 2021 4. Jumlah Penduduk Jompo Yang Disantuni Di Kota Tarakan,Tahun 2021 5. Jumlah Panti Asuhan Menurut Kecamatan Di Kota Tarakan, Tahun 2021	5 Variabel
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pembantu Pembina KeluargaBerencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan Di Kota Tarakan, Tahun 2021 2. Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan Dan Klasifikasi Keluarga Di Kota Tarakan,Tahun 2021	2 Variabel
6	Dinas Pendidikan	1. Data Sekolah Di Kota Tarakan, Tahun 2019	1 Variabel
7	Dinas Kesehatan	1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2020-2021 2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama SebulanTerakhir dan Tidak Berobat Jalan, Serta Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Tahun 2019-2021 3. Distribusi Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Selama sebulan Dan Tidak Berobat Jalan, Serta Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Tahun 2020-2021	3 Variabel
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Jumlah Populasi Ternak Menurut Kecamatan di Kota Tarakan, Tahun 2021 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tarakan, Tahun 2021	2 Variabel
9	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tarakan Menurut Jenis Pendapatan(ribu rupiah) Tahun 2018–2021 2. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tarakan Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah)Tahun 2018–2021	2 Variabel
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1. Jumlah Perkembangan SIUP Di Kota Tarakan Tahun 2021 2. Jumlah Tanda Daftar Perusahaan Di Kota Tarakan Tahun 2020 3. Jumlah Pasar Menurut Kecamatan Di Kota Tarakan Tahun 2021 4. Jumlah Toko, Kios, Dan Warung Di Kota Tarakan Tahun 2019	5 Variabel

		5. Jumlah Volume Dan Nilai Ekspor Di Kota Tarakan, Tahun 2017-2021	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Rekapitulasi Investasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Berdasarkan Sektor Jenis Usaha Tahun 2021 2. Rekapitulasi IUMK Kota Tarakan, Tahun 2921 3. Rekapitulasi IUMK Kota Tarakan pertriwulan Tahun 2021 4. Rekapitulasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2021	4 Variabel
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan serta Pariwisata	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kedatangan Dari Luar NegeriTahun 2021 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Asal Negara SelamaTahun 2021 3. Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan Dan Rekreasi Di Kota TarakanTahun 2021 4. Daftar Nama Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Menurut Wilayah Di Kota Tarakan Tahun 2021 5. Daftar Nama Usaha Jasa Catering Di Kota Tarakan Tahun 2021 6. Daftar Nama Usaha Jasa Bar, Diskotik Dan Karaoke Di Kota Tarakan Tahun 2021 7. Data Hotel dan Fasilitasnya Di Kota Tarakan Tahun 2021 8. Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Negara Di Kota Tarakan Tahun 2021 (menurut laporan hotel) 9. Jumlah Kamar Yang Terjual Menurut Hotel di Kota Tarakan Tahun 2021 10. Rekapitulasi Kunjungan Wisatawan Pada Obyek Wisata Di Kota Tarakan Tahun 2021	10 Variabel
13	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Tahun 2017-2021 2. Data Jumlah TPA, Bank Sampah Dan TPST Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020	2 Variabel
14	Dinas PU dan Penataan Ruang	1. Kawasan Banjir Kota Tarakan, Tahun 2021 2. Data Lokasi Banjir di Kota Tarakan, Tahun 2020 3. Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan Dan Status Jalan (Kilometer) di Kota Tarakan, Tahun 2021	5 Variabel

		4. Data Jembatan Kota Tarakan Tahun 2021 .5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tarakan Tahun 2021	
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tarakan Tahun 2021 2. Jumlah Perumahan di Kota Tarakan Tahun 2021 3. Jumlah Pemakaman di Kota Tarakan Tahun 2021 4. Data Pertanahan di Kota Tarakan Tahun 2020	4 Variabel
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Laporan Rekapitulasi Pengelolaan Perpustakaan Daerah Tahun 2021 2. Daftar Arsip Dinas Dan Perpustakaan Daerah Tahun 2021	2 Variabel
17	Dinas Perhubungan	1. Data Kendaraan Dan Perlengkapan Jalan Tahun 2021	1 Variabel
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Daftar Media Radio Penyiaran di Kota Tarakan Tahun 2021 2. Daftar Media Elektronik Radio Televisi di Kota Tarakan Tahun 2021 3. Daftar Media Elektronik Telekomunikasi di Kota Tarakan Tahun 2021 4. Daftar Amatir Radio Telekomunikasi Tahun 2021 5. Data Menara Telekomunikasi Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2021 6. Data Menara Telekomunikasi Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 20201 7. Data Menara Telekomunikasi Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2021 8. Data Menara Telekomunikasi Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2021	8 Variabel
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Jumlah Partai Politik Kota Tarakan Tahun 2020	1 Variabel
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Data Banjir Per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021 2. Data Gempa Bumi Per Kecamatan di Kota Tarakan 2021 3. Data Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021 4. Data Pohon Tumbang Per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021 5. Data Angin Kencang Per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021	7 Variabel

		6. Data Kebakaran dan Lahan Per kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021 7. Data Abrasi Per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021	
21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1. Banyaknya Perusahaan Dan Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Industri Kota Tarakan Tahun 2021	1 Variabel
22	Kecamatan Tarakan Timur	1. Data Pemerintahan di Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2021 2. Data Luas Wilayah dan Kependudukan di Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2021 3. Data Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2021 4. Banyaknya Jamaah Haji menurut Kelamin dan Kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2021 5. Banyaknya Jumlah Posyandu menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2021 6. Data Jumlah Perguruan Tinggi di Kecamatan Tarakan Timur 2021 7. Banyaknya Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kecamatan diKota Tarakan Tahun 2021	7 Variabel
23	Kecamatan Tarakan Barat	1. Data Pemerintahan di Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2021 2. Data Luas Wilayah dan Kependudukan di Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2021 3. Data Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2021 4. Banyaknya Jamaah Haji menurut Kelamin dan Kelurahan di Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2021 5. Banyaknya Jumlah Posyandu Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2021 6. Data SMU/SMK/MA Menurut Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Tarakan BaratTahun 2021 7. Data Jumlah Mahasiswa, Dosen, dan Wisudawan Perguruan Tinggi di Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2021 8. Data SD, SMP, SMA/SMK menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan BaratTahun 2021 9. Data Sarana Ibadah Di Wilayah Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2021 10. Banyaknya Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021	10 Variabel

24	Kecamatan Tarakan Tengah	1. Data Pemerintahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 2. Data Luas Wilayah dan Kependudukan di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 3 . Data Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 4. Banyaknya Jamaah Haji menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan d iKecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 5. Banyaknya Jumlah Posyandu menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 6. Data Jumlah Mahasiswa, Dosen dan Wisudawan Perguruan Tinggi menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 7. Jumlah Sarana Ibadah menurut Kelurahan Di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 8. Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid Dan Guru TK/Raudathul Atfal (RA) menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 9. Banyaknya Murid yang Lulus Ujian Tingkat SD/ MI menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 10. Bayaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru SMP/MTs menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 11. Bayaknya Murid yang lulus ujian tingkat SMP/ MTs menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2021 12. Banyaknya Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021	12 Variabel
25	Kecamatan Tarakan Utara	1. Data Pemerintahan Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 2. Data Luas Wilayah dan Kependudukan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 3. Data Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 4. Banyaknya Jamaah Haji menurut Kelamin dan Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 5. Banyaknya Jumlah Posyandu Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 6. Jumlah Sarana Ibadah menurut Kelurahan Di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021	13 Variabel

		7. Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru TK/Raudathul Atfal (RA) Menurut Kelurahan Di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 8. Banyaknya Murid yang lulus ujian tingkat SD/ MI Menurut Kelurahan diKecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 9. Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru SMP/ MTs Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 10. Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru SMU/SMK/MA Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 11. Banyaknya Murid yang lulus ujian tingkat SD/MI Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 12. Banyaknya Murid yang lulus ujian tingkat SMP/MTs Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 13. Banyaknya Murid yang lulus ujian tingkat SMU/SMK/MA Menurut Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021	
26	Dinas Perikanan	1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Sub Sektor di Kota Tarakan, Tahun 2021 2 Jumlah Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Ribu Rupiah) Perikanan Tangkap di Laut Menurut Jenis Alat Penangkapan di Kota Tarakan, tahun 2020-2021 3. Nilai Produksi Perikanan Kota Tarakan Tahun 2020	3 Variabel
27	Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan	1. Daftar Tindak Pelanggaran PERDA yang Terjadi di Kota Tarakan, Tahun 2021	1 Variabel
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Data Jumlah Perencanaan dan Penelitian	1 Variabel (Belum Memberikan Data)
29	Sekkretariat Daerah	1. Produk Hukum	1 Variabel (Belum Memberikan Data)
30	Inspektorat Daerah	1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Tahun 2021	1 Variabel
Total Variabel			**131 Variabel**

Dari 30 OPD target pengumpulan data :

1. Sebanyak 28 OPD ikut berkontribusi memberikan data.
2. Sebanyak 2 OPD belum berkontribusi memberikan data.
   - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Sekretariat Daerah

II. Publikasi data Statistik Sektoral

- Cetak Buku Data Statistik Sektoral Kota Tarakan sebanyak 60 Buku
- Cetak Buku Kota Tarakan Dalam Angka sebanyak 60 Buku.
- Cetak Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan sebanyak 65 Buku.
- Cetak Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Kota Tarakan sebanyak 65 Buku.

Buku telah didistribusikan ke 30 OPD Se- Kota Tarakan.

Tarakan, Januari 2023
Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Tarakan

dr. WITOYO
NIP. 196501112000121002

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DESEMBER

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEU. (%)	REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
1	2	3		4	5	6	7	8
13	**JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD**	**6,500,884,800.00**	**100.00**	**99.84**	**94.01**	**6,111,168,153.00**	**389,716,647.00**	**dr. WITOYO**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4,600,592,160.00**	**100.00**	**99.99**	**96.41**	**4,435,272,057.00**	**165,320,103.00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**3,958,076,000.00**	**100.00**	**100.00**	**96.40**	**3,815,417,041.00**	**142,658,959.00**	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,900,000,000.00	100.00	100.00	96.34	3,757,341,041.00	142,658,959.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58,076,000.00	100.00	100.00	100.00	58,076,000.00	0.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60,056,160.00**	**100.00**	**99.25**	**95.72**	**57,486,751.00**	**2,569,409.00**	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,991,300.00	100.00	100.00	99.56	2,978,000.00	13,300.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,194,760.00	100.00	100.00	95.25	27,806,690.00	1,388,070.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,999,700.00	100.00	100.00	99.48	7,958,360.00	41,340.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,870,400.00	100.00	97.74	94.33	18,743,701.00	1,126,699.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**352,500,000.00**	**100.00**	**100.00**	**97.32**	**343,038,025.00**	**9,461,975.00**	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	100.00	100.00	92.32	2,308,000.00	192,000.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350,000,000.00	100.00	100.00	97.35	340,730,025.00	9,269,975.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**229,960,000.00**	**100.00**	**100.00**	**95.38**	**219,330,240.00**	**10,629,760.00**	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,000,000.00	100.00	100.00	95.17	209,370,240.00	10,629,760.00	DHIMAS CLARA PERMANA,S.Si.T
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,960,000.00	100.00	100.00	100.00	9,960,000.00	0.00	ERLITA TRISNA, SE
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**946,000,000.00**	**100.00**	**100.00**	**88.76**	**839,686,000.00**	**106,314,000.00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**946,000,000.00**	**100.00**	**100.00**	**88.76**	**839,686,000.00**	**106,314,000.00**	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	896,000,000.00	100.00	100.00	88.14	789,738,000.00	106,262,000.00	RANO HARYONO WARPAN, S.Kom
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	40,000,000.00	100.00	100.00	99.87	39,948,000.00	52,000.00	SUGIATMOKO, ST
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	4,900,000.00	100.00	100.00	100.00	4,900,000.00	0.00	SUGIATMOKO, ST
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5,100,000.00	100.00	100.00	100.00	5,100,000.00	0.00	SUGIATMOKO, ST
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**889,029,500.00**	**100.00**	**99.19**	**88.37**	**785,624,916.00**	**103,404,584.00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**889,029,500.00**	**100.00**	**99.19**	**88.37**	**785,624,916.00**	**103,404,584.00**	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	70,000,000.00	100.00	100.00	52.78	36,948,886.00	33,051,114.00	MUJIONO, SE.,M.Cs
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	309,509,500.00	100.00	97.68	96.49	298,640,850.00	10,868,650.00	DHIMAS CLARA PERMANA,S.Si.T
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	509,520,000.00	100.00	100.00	88.33	450,035,180.00	59,484,820.00	SANTOSO PRIHADI, S.Kom

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**39,999,500.00**	**100.00**	**93.33**	**76.60**	**30,639,860.00**	**9,359,640.00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**39,999,500.00**	**100.00**	**93.33**	**76.60**	**30,639,860.00**	**9,359,640.00**	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	24,999,820.00	100.00	100.00	71.93	17,981,600.00	7,018,220.00	JUASAP SIMAMORA, SE., M.Kes
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	4,999,840.00	100.00	100.00	96.92	4,845,600.00	154,240.00	JUASAP SIMAMORA, SE., M.Kes
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	9,999,840.00	100.00	93.31	78.13	7,812,660.00	2,187,180.00	JUASAP SIMAMORA, SE., M.Kes
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**25,263,640.00**	**100.00**	**92.09**	**78.95**	**19,945,320.00**	**5,318,320.00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**25,263,640.00**	**100.00**	**92.09**	**78.95**	**19,945,320.00**	**5,318,320.00**	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9,999,780.00	100.00	98.01	91.80	9,180,000.00	819,780.00	RAKHMAT KURNIADI, ST
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,263,920.00	100.00	90.91	58.24	4,812,660.00	3,451,260.00	RAKHMAT KURNIADI, ST
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6,999,940.00	100.00	85.04	85.04	5,952,660.00	1,047,280.00	RAKHMAT KURNIADI, ST

Tarakan, 31 Desember 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

LILIS DAMAYANTI, S.Pt
Pembina TK.I
NIP. 19680705 199803 2 009

Evaluasi Terhadap RKPD
Kota Tarakan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 8 * 100) %	
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																							
	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwidth) NOC/Data Center	100 persen	Rp. 2.409.520.000	100 persen	Rp. 454.605.755	100 persen	Rp. 509.520.000	-	Rp. 800.000	-	Rp. 188.875.250	-	Rp. 108.330.000	-	Rp. 152.229.930	-	Rp. 450.035.180	-	88.33%	-	Rp. 904.640.935	-	37.54%
		2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																							
1		2	16	03	2.02	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kapasitas bandwith data center/NOC server dan TCD yang terkoneksi	60 Mbps	Rp. 2.409.520.000	15 Mbps	Rp. 454.605.755	15 Mbps	Rp. 509.520.000	15 Mbps	Rp. 800.000	15 Mbps	Rp. 188.875.250	15 Mbps	Rp. 108.330.000	15 Mbps	Rp. 152.229.930	15 Mbps	Rp. 450.035.180	100.00%	88.33%	30 Mbps	Rp. 904.640.935	50.00%	37.54%
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00%	88.33%			50.00%	37.54%
													Predikat kinerja																	
	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik, pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100 persen	Rp. 5.100.000	100,77 persen	Rp. 0	100 persen	Rp. 5.100.000	-	Rp. 0	-	Rp. 0	-	Rp. 0	-	Rp. 5.100.000	-	Rp. 5.100.000	100.00%	100.00%	-	Rp. 5.100.000	100.38%	100.00%
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																							
1		2	16	02	2.01	1	Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitor	130 menara	Rp. 5.100.000	131 menara	Rp. 0	130 menara	Rp. 5.100.000	0 menara	Rp. 0	21 menara	Rp. 0	0 menara	Rp. 0	109 menara	Rp. 5.100.000	130 menara	Rp. 5.100.000	100.00%	100.00%	261 menara	Rp. 5.100.000	100.38%	100.00%
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00%	100.00%			100.38%	100.00%
													Predikat kinerja																	
	Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik, pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100 persen	Rp.2.404.900.000	100 persen	Rp. 485.991.054	100 persen	Rp. 840.900.000	-	Rp. 0	-	Rp. 55.000.000	-	Rp. 176.682.000	-	Rp. 602.904.000	-	Rp. 834.586.000	-	88.70%	-	Rp. 1.320.577.054	-	54.96%
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																							
1		2	16	02	2.01	1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Jenis Media Layanan Informasi	4 jenis	Rp. 2.240.000.000	4 jenis	Rp. 446.907.494	4 jenis	Rp. 896.000.000	4 jenis	Rp. 0	4 jenis	Rp. 55.000.000	4 jenis	Rp. 131.950.000	4 jenis	Rp. 572.718.000	4 jenis	Rp. 789.738.000	100.00%	88.14%	4 jenis	Rp. 1.236.645.494	100%	55.21%
2		2	16	02	2.01	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah cover baleho yang menampilkan program pemerintah kota	56 buah	Rp. 160.000.000	16 buah	Rp. 39.083.560	16 buah	Rp. 40.000.000	2 buah	Rp. 0	6 buah	Rp. 0	2 buah	Rp. 14.732.000	6 buah	Rp. 25.216.000	16 buah	Rp. 39.948.000	100.00%	99.87%	31 buah	Rp. 78.031.560	55.36%	49%
3		2	16	02	2.01	3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan PPID	4 kali	Rp. 4.900.000	0 kali	Rp. 0	1 kali	Rp. 4.900.000	0 kali	Rp. 0	0 kali	Rp. 0	0 kali	Rp. 0	1 kali	Rp. 4.900.000	1 kali	Rp. 4.900.000	100.00%	100.00%	1 kali	Rp. 4.900.000	50.00%	100%
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00%	98.00%			68.45%	68.20%
													Predikat kinerja																	
	Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	100 persen	Rp. 2.294.409.500	100 persen	Rp. 400.062.000	100 persen	Rp. 370.509.500	-	Rp. 20.595.000	-	Rp. 204.095.850	-	Rp. 31.755.000	-	Rp. 79.143.886	-	Rp. 335.589.736	-	88.45%	-	Rp. 735.651.736	-	32.06%
		2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																							
1		2	16	03	2.02	1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Jenis Aplikasi Layanan Publik	14 jenis	Rp. 984.900.000	4 jenis	Rp. 400.062.000	2 jenis	Rp. 70.000.000	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	2 jenis	Rp. 36.949.886	2 jenis	Rp. 36.948.886	100.00%	52.78%	6 jenis	Rp. 437.010.886	43%	14.37%
2		2	16	03	2.02	2	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah jenis layanan publik	2 jenis	Rp. 1.309.509.500	1 jenis	Rp. 0	2 jenis	Rp. 309.509.500	1 jenis	Rp. 20.595.000	1 jenis	Rp. 204.095.850	2 jenis	Rp. 31.755.000	2 jenis	Rp. 42.194.000	2 jenis	Rp. 298.640.850	100.00%	96.49%	2 jenis	Rp. 298.640.850	100.00%	22.81%
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100%	75%			71%	34%
													Predikat kinerja																	
		2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																							
	Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100 persen	Rp. 159.999.500	100 persen	Rp. 32.107.500	100 persen	Rp. 39.999.500	-	Rp. 0	-	Rp. 0	-	Rp. 860.000	-	Rp. 29.779.360	-	Rp. 30.639.360	-	76.60%	-	Rp. 62.747.360	-	39.22%
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																							
1		2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah jenis buku data dan statistik daerah	820 buku	Rp. 94.999.820	250 buku	Rp. 23.378.000	190 buku	Rp. 24.999.820	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	190 buku	Rp. 17.981.600	190 buku	Rp. 17.981.600	100.00%	71.93%	440 buku	Rp. 41.359.600	53.66%	34.61%
2		2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah jenis buku Statistik Sektoral (Buku Statistik Setoral Kota Trk)	180 jenis	Rp. 24.999.840	0 buku	Rp. 0	60 jenis	Rp. 4.999.840	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	60 buku	Rp. 4.845.600	60 buku	Rp. 4.845.600	100.00%	96.92%	60 buku	Rp. 4.845.600	33.33%	19.38%
3		2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan FKSD dan rakor FKSD	8 kegiatan	Rp. 39.999.840	2 kegiatan	Rp. 8.729.500	2 kegiatan	Rp. 9.999.840	0 kegiatan	Rp. 0	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 860.000	1 kegiatan	Rp. 6.912.680	2 kegiatan	Rp. 7.912.680	100.00%	78.13%	4 kegiatan	Rp. 16.542.180	50.00%	41.36%
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00%	82.32%			45.66%	28.45%
													Predikat kinerja																	

No	Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %	
		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																							
	Meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sosialisasi keamanan informasi	100 persen	Rp. 45.263.040	-	Rp. 4.780.000	100 persen	Rp. 25.263.640	-	Rp. 0	-	Rp. 0	-	Rp. 9.480.000	-	Rp. 10.465.320	-	Rp. 19.945.320	-	44.06%	-	Rp.24.725.320	-	54.63%
		2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																							
1		2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan tata kelola keamanan informasi	3 kegiatan	Rp. 15.999.780	0 kegiatan	Rp. 0	2 kegiatan	Rp. 9.999.780	0 kegiatan	Rp. 0	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 5.640.000	1 kegiatan	Rp. 3.540.000	2 kegiatan	Rp. 9.180.000	100.00%	91.80%	2 kegiatan	Rp. 9.180.000	66.67%	57.38%
2		2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi surat elektronik dan sandi	4 kegiatan	Rp. 17.263.920	2 kegiatan	Rp. 4.780.000	1 kegiatan	Rp. 8.263.920	0 kegiatan	Rp. 0	0 kegiatan	Rp. 0	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 4.812.660	1 kegiatan	Rp. 4.812.660	100.00%	58.24%	3 kegiatan	Rp. 9.592.660	75.00%	55.56%
3		2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kegiatan bimtek dan monev bidang keamanan informasi	3 kegiatan	Rp. 9.999.940	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 6.999.940	0 kegiatan	Rp. 0	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 3.840.000	0 kegiatan	Rp. 2.112.660	1 kegiatan	Rp. 5.952.660	100.00%	85.04%	1 kegiatan	Rp. 5.952.660	33.33%	59.54%
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00%	78.36%			58.33%	59.69%
														Predikat kinerja																
		X																												
		X	XX																											
	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 persen	Rp.18.680.838.621	-	Rp. 4.126.506.664	100 persen	Rp. 4.600.592.160	-	Rp. 860.139.671	-	Rp. 1.170.588.543	-	Rp. 1.239.952.759	-	Rp. 1.164.541.084	-	Rp. 4.435.272.057	-	96.41%	-	Rp. 8.561.778.721	-	45.83%
		X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
1		X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	4 dokumen	Rp. 5.000.000	1 buah	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 0	0 dokumen	Rp. 0	0 dokumen	Rp. 0	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 0	100.00%	0.00%	2 dokumen	Rp. 0	50.00%	0.00%
2		X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi dan Neraca Keuangan	4 dokumen	Rp. 5.000.000	1 buah	Rp. 0	0 dokumen	Rp. 0	0 dokumen	Rp. 0	0 dokumen	Rp. 0	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 0	100.00%	0.00%	2 dokumen	Rp. 0	50.00%	0.00%
		X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
1		X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan tepat waktu selama 1 tahun	116 orang	Rp. 18.260.622.561	26 orang	Rp. 3.564.426.186	29 orang	Rp. 3.900.000.000	29 orang	Rp. 714.532.056	29 orang	Rp. 1.066.726.529	30 orang	Rp. 1.098.356.303	29 orang	Rp. 907.627.153	29 orang	Rp. 3.787.341.041	100.00%	98.34%	58 orang	Rp. 7.311.769.227	50.00%	44.97%
2		X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang menerima tunjangan selama 1 tahun	36 orang	Rp. 243.347.500	9 orang	Rp. 64.786.500	9 orang	Rp. 58.076.000	9 orang	Rp. 9.221.000	9 orang	Rp. 9.221.000	9 orang	Rp. 18.442.000	9 orang	Rp. 21.192.000	9 orang	Rp. 58.076.000	100.00%	100.00%	18 orang	Rp. 122.862.500	50.00%	50.51%
		X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
1		X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 buah	Rp. 6.000.000	1 buah	Rp. 5.940.000	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0.00%	0.00%	1 buah	Rp. 5.940.000	100.00%	99.00%
2		X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	2 buah	Rp. 600.000	2 buah	Rp. 600.000	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0 buah	Rp. 0	0.00%	0.00%	2 buah	Rp. 600.000	100.00%	100.00%
		X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
3		X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik/penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	20 jenis	Rp. 11.991.300	5 jenis	Rp. 2.949.000	5 jenis	Rp. 2.991.300	5 jenis	Rp. 2.978.000	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	5 jenis	Rp. 2.978.000	100.00%	99.56%	10 jenis	Rp. 5.927.000	50.00%	49.43%
4		X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih dan jumlah ATK yang tersedia	157 jenis	Rp. 124.194.760	40 jenis	Rp. 34.358.800	35 jenis	Rp. 29.194.760	27 jenis	Rp. 10.816.500	0 jenis	Rp. 0	7 jenis	Rp. 12.196.300	1 jenis	Rp. 4.963.880	35 jenis	Rp. 27.806.680	100.00%	95.26%	75 jenis	Rp. 62.165.190	47.77%	50.05%
5		X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan/penggandaan dan penjilidan	12 jenis	Rp. 37.999.700	3 jenis	Rp. 9.733.100	3 jenis	Rp. 7.999.700	3 jenis	Rp. 3.919.600	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 3.595.100	0 jenis	Rp. 363.660	3 jenis	Rp. 7.958.360	100.00%	99.48%	6 jenis	Rp. 17.691.460	50.00%	46.56%
6		X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	4 jenis	Rp. 6.000.000	1 jenis	Rp. 1.800.000	1 jenis	Rp. 0	1 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	1 jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	2 jenis	Rp. 1.800.000	50.00%	30.00%
7		X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat teknis/koordinasi/konsultasi dan informasi dengan kabupaten/kota di wilayah Kaltara dan di luar propinsi Kaltara	15 kali	Rp. 82.870.400	2 kali	Rp. 13.193.350	4 kali	Rp. 19.870.400	1 kali	Rp. 0	0 kali	Rp. 0	1 kali	Rp. 0	2 kali	Rp. 18.743.701	4 kali	Rp. 18.743.701	100.00%	94.33%	6 kali	Rp. 31.937.051	40.00%	38.48%
		X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
8		X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor	6 jenis	Rp. 30.000.000	2 jenis	Rp. 10.000.000	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	-	-	0 jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	2 jenis	Rp. 9.620.000	33.33%	32.07%
		X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
9		X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	800 lembar	Rp. 8.000.000	200 lembar	Rp. 2.000.000	200 lembar	Rp. 2.000.000	100 lembar	Rp. 1.000.000	0 lembar	Rp. 0	0 lembar	Rp. 0	100 lembar	Rp. 1.000.000	200 lembar	Rp. 2.000.000	100.00%	50.00%	400 lembar	Rp. 4.000.000	50.00%	50.00%
								Jumlah paket pengiriman	48 bulan	Rp. 3.600.000	12 bulan	Rp. 369.600	12 bulan	Rp. 600.000	3 bulan	Rp. 0	3 bulan	Rp. 0	3 bulan	Rp. 0	3 bulan	Rp. 308.000	12 bulan	Rp. 308.000	100.00%	61.60%	24 bulan	Rp. 677.600	50.00%	18.96%
10		X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan dasar energi listrik, telefon dan internet	48 bulan	Rp. 891.000.000	12 bulan	Rp. 207.417.968	12 bulan	Rp. 360.000.000	3 bulan	Rp. 78.115.015	3 bulan	Rp. 73.259.514	3 bulan	Rp. 92.245.236	3 bulan	Rp. 97.060.280	12 bulan	Rp. 340.730.025	100.00%	97.35%	24 bulan	Rp. 548.147.993	50.00%	61.52%
		X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
11		X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM/Oli yang diadakan	47.474 liter	Rp. 345.368.177	8.096 liter	Rp. 79.133.360	11.392 liter	Rp. 86.547.200	3.210 liter	Rp. 14.433.000	3.210 liter	Rp. 21.382.600	3.210 liter	Rp. 21.256.500	1.762 liter	Rp. 29.465.200	11.392 liter	Rp. 86.547.200	100.00%	100.00%	19.488 liter	Rp. 165.680.760	41.06%	39.45%
								Jumlah kendaraan roda 4 dan 2 untuk pengurusan perpanjangan surat kendaraan bermotor	24 unit	Rp. 80.125.550	11 unit	Rp. 12.774.400	18 unit	Rp. 20.069.050	2 unit	Rp. 1.115.900	0 unit	Rp. 0	6 unit	Rp. 3.933.600	10 unit	Rp. 4.575.500	18 unit	Rp. 9.645.000	100.00%	48.06%	29 unit	Rp. 22.419.400	60.42%	22.24%
								Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan Roda 2	48 Bulan	Rp. 151.840.000	12 Bulan	Rp. 32.189.400	12 Bulan	Rp. 37.280.000	3 Bulan	Rp. 8.736.000	0 Bulan	Rp. 0	6 Bulan	Rp. 7.760.000	3 Bulan	Rp. 22.740.000	12 Bulan	Rp. 37.196.000	100.00%	99.77%	24 Bulan	Rp. 69.385.400	50.00%	30.72%
								Jumlah suku cadang roda 2 dan 4 yang diadakan	77 jenis	Rp. 302.866.273	23 jenis	Rp. 70.388.300	18 jenis	Rp. 76.103.750	9 jenis	Rp. 13.332.600	0 jenis	Rp. 0	2 jenis	Rp. 12.177.720	7 jenis	Rp. 50.421.720	18 jenis	Rp. 75.982.040	100.00%	99.84%	41 jenis	Rp. 146.370.240	53.25%	31.70%

No	Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %	
12		X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 kali	Rp. 45.000.000	1 kali	Rp. 15.000.000	0 kali	Rp. 0	0 kali	Rp. 0	0 kali	Rp. 0	0 kali	Rp. 0	0 kali	Rp. 0	0 kali	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	1 kali	Rp. 15.000.000	25.00%	33.33%
13		X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	Rp. 38.960.000	2 jenis	Rp. 9.826.000	3 jenis	Rp. 9.960.000	1 jenis	Rp. 4.090.000	0 jenis	Rp. 0	0 jenis	Rp. 0	2 jenis	Rp. 5.960.000	3 jenis	Rp. 9.960.000	100,00%	100,00%	5 jenis	Rp. 19.786.000	55.56%	49.51%
													Rata-rata capaian kinerja (%)												88.89%	66.98%			52.68%	41.85%
													Predikat kinerja																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM)										Rp. 26.000.031.261		Rp. 5.504.052.973		Rp. 6.500.884.800		Rp. 881.384.671		Rp. 1.618.559.643		Rp. 1.567.059.759		Rp. 2.044.164.080		Rp. 6.111.168.153	98.41%	84.09%		Rp. 11.615.221.126	63.85%	52.76%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM)																									ST	T			R	R

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:

Keterangan :

PREDIKAT KINERJA	
ST (Sangat Tinggi)	(91,00% < 100%)
T (Tinggi)	(76,00% < 90,99%)
S (Sedang)	(66,00% < 75,99%)
R (Rendah)	(51,00% < 65,99%)
SR (Sangat Rendah)	(< 50,99%)

catatan :

Target Renstra (2021, 2022 = DPA; 2022, 2024 = Renstra)

Tarakan, 31 Desember 2022
Kepala Dinas,
an. Plh Sekretaris

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

LILIS DAMAYANTI, S.Pt
NIP. 19680705 199803 2 009

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No.01 Telp. (0551) 21072-21859 Fax : (0551) 21859 TARAKAN
Email : bawas@tarakankota.go.id Website http://inspektorat.tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi Inormatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi Inormatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Inormatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan yang disajikan oleh manajemen Dinas Komunikasi Inormatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Tarakan, 24 Februari 2022

INSPEKTUR,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

ABD. AZIS HASAN, A.P, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 197502121995011001

KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√	

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

LEMBAR KESESUAIAN FORMAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DKISP

	Indikator Penilaian	Ketersediaan	Catatan
1.	LKIP telah menyajikan capaian dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
2.	LKIP telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	✓	
3.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	✓	Sajikan dlm form yg lebih mudah dibaca. Telah disajikan tabel 3.2
4.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	–	
5.	LKIP telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
6	LKIP telah menyajikan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	analisis untuk SPM belum tersaji Telah tersaji Tabel 3.6.
7.	LKIP menyajikan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja disertai dengan foto/diagram/grafik	✓	
8.	LKIP telah menyajikan penghargaan yang telah diterima di tahun bersangkutan	–	
9.	LKIP telah menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya		
	LKIP telah melampirkan :		
	a. IKU Perangkat Daerah	✓	
	b. Perjanjian Kinerja Tahun pelaporan	✓	
	c. Rencana Kerja/Renja Tahun Pelaporan	✓	Berupa Matrik
	d. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja		
	e. Rekap Laporan Konsolidasi Tahun Pelaporan	✓	